



Dr. Basri Basri, S.Pd., M.Si
Dr. Hj. Siti Habibah, M.Si
Syamsu Alam, S.Si, M.Si
Muhammad Hasan, S.Pd., N.Pd

Model Kebijakan Belanja Pemerintah

Sektor Pendidikan
dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi



**MODEL KEBIJAKAN BELANJA
PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN
DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN
EKONOMI**

**Dr. Basri Bado, S.Pd.,M.Si.
Dr. Hj. Sitti Hasbiah, M.Si.,
Muhammad Hasan, S.Pd.,M.Pd.
Syamsu Alam, S.Si.,M.Si**

carabaca

**Model Kebijakan Belanja
Pemerintah Sektor Pendidikan Dalam Perspektif
Pembangunan Ekonomi**

Copyright @ *Dr. Basri Bado, S.Pd.,M.Si., Dr. Hj. Sitti Hasbiah, M.Si.,
Muhammad Hasan, S.Pd.,M.Pd., Syamsu Alam, S.Si.,M.Si*

Diterbitkan Pertama Kali dalam Bahasa Indonesia oleh penerbit carabaca
Cetakan I , Desember 2017

Editor : Muh. Natsir
Penata Letak : sanggarrakyatkepanasan
Sampul : Aman

Perpustakaan Nasional, Katalog dalam terbitan (KDT)

**Model Kebijakan Belanja
Pemerintah Sektor Pendidikan Dalam Perspektif
Pembangunan Ekonomi**

x + 172 halaman; 15 cm x 23 cm

ISBN : 978-602-1175- 43-9

Penerbit:

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah Buku Carabaca Makassar

Alamat: Jl. Mustafa Dg. Bunga No. 3A Kompleks Griya Samata Permai

Telp: 081241404323

Email: lari_larija@yahoo.co.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak seluruh dan sebagian

Isi buku ini tanpa izin tertulis penerbit

Dicetak oleh percetakan carabaca

Alamat: Jl. Mustafa Dg. Bunga No. 3A Kompleks Griya Samata Permai

Telp: 081241404323

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Fenomena dampak kebijakan pemerintah terhadap belanja pendidikan yang selama 10 tahun terakhir menjadi bahan yang menarik untuk diteliti, dalam hal ini adalah keterkaitan variable-variabel yang secara teori berpengaruh positif terhadap kemajuan pembangunan pendidikan. Pembangunan sektor pendidikan di Sulawesi Selatan menjadi daya tarik tersendiri untuk diteliti mengingat Sulawesi selatan merupakan salah satu provinsi yang 10 tahun terakhir telah mencanangkan pendidikan gratis di Indonesia. Atas dasar tersebut peneliti tertarik mengkaji untuk menganalisis dan menyusun model kebijakan yang tepat kebijakan pemerintah dalam belanja pendidikan dampaknya terhadap sektor social ekonomi di Sulawesi Selatan. Persoalan yang diamati oleh peneliti adalah selama dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2006-2015) kenaikan belanja pemerintah sector pendidikan khususnya di Sulawesi Selatan telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan bahkan rata-rata kenaikan 90%-100% pada daerah kabupaten/kota. Hasil dari penelitian tersebutlah

yang saat ini dapat dinikmati oleh pembaca dalam bentuk buku.

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan kerjasama dari berbagai pihak yang terkait. maka buku ini tak akan dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah mendukung penulisan buku ini.

Penulis mengharapkan berbagai masukan saran dari berbagai pihak untuk menyempurnakan buku ini ini, dan penulis mengharap pula agar penulisan buku ini bermanfaat bagi pihak terkait, dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Makassar, September 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Pertama	PENDIDIKAN UNTUK SEMUA: RELASI PEMBANGUNAN DAN PENDIDIKAN	1
Kedua	PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI	23
Ketiga	PENDIDIKAN SEBAGAI INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA	35
Keempat	SELAYANG PANDANG: PENGELUARAN PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN	47
Kelima	PENGELUARAN PEMERINTAH	53
Keenam	TEORI KEMISKINAN (<i>POVERTY</i>)	73
Ketujuh	OUTCOME PENDIDIKAN DALAM TEORI HUMAN CAPITAL	93
Kedelapan	KEMISKINAN DAN PENDIDIKAN	103
Kesembilan	KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN ANTAR DAERAH	111
Kesepuluh	KINERJA PENDIDIKAN	121
Kesebelas	BELANJA PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN	127
Keduabelas	KETIMPANGAN PENDAPATAN	139
Ketigabelas	TINGKAT KEMISKINAN ANTAR DAERAH DAN LAMA SEKOLAH	145

Keempatbelas	KASUS PENELITIAN	149
	DAFTAR PUSTAKA	155
	BIODATA PENULIS	169

Bagian Pertama

Pendidikan untuk Semua: Relasi Pembangunan dan Pendidikan

A. Pendidikan untuk Semua

Pada hakikatnya pendidikan merupakan upaya membangun budaya dan peradaban bangsa. Oleh karena itu, UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah terus-menerus memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada gilirannya sangat memengaruhi kesejahteraan umum dan pelaksanaan ketertiban dunia. Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberikan kontribusi signifikan atas pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Lebih lanjut, pendidikan yang memiliki empat pilar utama, yaitu belajar untuk belajar (*learning how to learn*), belajar untuk mengetahui (*learning how to know*), belajar untuk menjadi (*learning how to be*), dan belajar untuk hidup dengan orang lain (*learning how to live together*), akan menciptakan masyarakat terpelajar yang menjadi

prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan.

Ekonom Amerika Serikat, Dale Jorgenson, *et al.* (1987) mempublikasikan temuan penelitiannya pada ekonomi Amerika Serikat dengan rentang waktu 1948-79. Temuan tersebut menunjukkan bahwa 46 persen pertumbuhan ekonomi adalah disebabkan pembentukan modal (*capital formation*), 31 persen disebabkan pertumbuhan tenaga kerja dan modal manusia serta 24 persen disebabkan kemajuan teknologi. Dari temuan tersebut meskipun modal manusia memegang peranan penting dalam pertumbuhan penduduk, para ahli mulai dari ekonomi, politik, sosiologi bahkan *engineering* lebih menaruh prioritas pada faktor modal fisik dan kemajuan teknologi.

Meskipun modal fisik dan kemajuan teknologi memberikan sumbangsih yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, namun peran modal manusia dalam pembangunan ekonomi tidak dapat dilupakan, karena semaju apapun modal fisik dan teknologi, jika modal manusia kurang diperhatikan, hal tersebut justru akan berdampak buruk dalam kehidupan bermasyarakat.

Manusia, modal fisik, dan kemajuan teknologi, merupakan 3 aspek yang saling berinteraksi dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Terdapat tiga hal utama dalam pembangunan suatu bangsa, yaitu menyangkut sumber daya manusia, teknologi dan dana. Ketiga faktor pokok tersebut merupakan masukan (input)

dalam produksi pendapatan nasional. Semakin besar jumlah sumberdaya manusia semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Purwanto, 2006).

Salah satu aspek yang berkaitan erat dengan modal manusia adalah aspek pendidikan. Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia untuk menjadi insan yang paripurna, dewasa dan berbudaya (*civilized*). Terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapannya dan ada komitmen bersama. Adapun berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Berlangsung kontinu berarti bahwa pendidikan itu berlangsung terus menerus sepanjang hayat, yaitu sepanjang manusia hidup di muka bumi (*long life education*).

Namun, jika dikaitkan dengan persoalan pembangunan, pengembangan modal manusia melalui pendidikan masih menghadapi berbagai macam masalah, yang salah satunya adalah masih terdapatnya kesenjangan pendidikan yang disebabkan karena masih adanya kesenjangan antar daerah.

Kesenjangan antar daerah merupakan salah satu isu kebijakan yang sejak lama menjadi perhatian

pemerintah. Meskipun tingkat kesenjangan antar wilayah semakin membaik, namun pemerintah masih perlu meningkatkan intervensi kebijakan untuk terus mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah melalui pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Sauri (2008), menyatakan bahwa kondisi objektif dunia pendidikan dewasa ini sesungguhnya masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan mendasar, permasalahan tersebut secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat permasalahan utama, yaitu; Pertama, terkait dengan kualitas pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator utama yakni proses pembelajaran yang masih konvensional, kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal, jumlah dan kualitas buku di sekolah yang belum memadai. Kedua, pemerataan pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator utama yakni kerusakan sarana dan prasarana ruang kelas, keterbatasan aksesibilitas dan daya tampung, serta kekurangan tenaga guru. *Ketiga*, efisiensi pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator yakni penyelenggaraan otonomi pendidikan yang belum optimal (MBS belum optimal), keterbatasan anggaran (kemampuan pemerintah yang terbatas dan rendahnya partisipasi masyarakat), dan mutu SDM pengelola pendidikan. *Keempat*, relevansi pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator yakni kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang belum optimal, kurikulum yang belum berbasis masyarakat dan potensi

daerah, serta kecakapan hidup (*life skill*) yang dihasilkan belum optimal.

Apabila melihat keempat permasalahan tersebut, hampir keseluruhannya dialami oleh daerah tertinggal. Apabila mencermati interaksi antara pembukaan UUD 1945 alinea keempat, UUD 1945 pasal 31 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5, maka sangat jelas dan tegas bahwa eksistensi pendidikan itu untuk semua artinya untuk seluruh warga negara indonesia tanpa kecualinya. Namun, secara realita hal tersebut belum terwujud karena masih banyak ditemukan berbagai kasus pembangunan pendidikan yang kurang optimal khususnya di daerah terpencil.

Hasil kajian Vito, dkk (2015), A'ing (2015), Suardi, dkk (2016) menunjukkan bahwa pembagunan pendidikan di daerah terpencil masih menghadapi masalah susahya aksesnya menuju sekolah, sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai, dan jumlah tenaga pengajar yang tidak memadai.

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang terkait dengan pembangunan pendidikan di daerah tertinggal, maka penulis mencoba mengajukan suatu strategi yang berdasarkan pada pendidikan untuk semua (*education for all*). Ki Hajar Dewantara (1977), merumuskan pengertian pendidikan yang berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual dan tubuh anak); dalam Taman Siswa

tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya. Selanjutnya payung hukum atau asas legalitas tentang konsepsi pendidikan diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari kedua definisi tersebut, hakikat dari pendidikan untuk semua mulai tergambar, yaitu mengupayakan agar setiap warga negara dapat memenuhi haknya, yaitu layanan pendidikan. Hal ini juga sebagai upaya memenuhi amanah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 5, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkait dengan pendidikan untuk semua tertuang di dalam asas Taman Siswa. Adapun asas-asas Taman siswa adalah menjadi hak seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan, pengajaran harus membimbing anak menjadi manusia yang merdeka,

pendidikan harus didasarkan atas kebudayaan bangsa sendiri tanpa mengesampingkan kebudayaan bangsa-bangsa lain, pendidikan harus merata untuk seluruh rakyat, Taman siswa harus hidup dan berkembang dengan kekuatan sendiri, dan pendidik harus berhambra pada anak atas dasar sikap tanpa pamrih.

Jika dikaitkan dengan salah satu asas Taman Siswa, yaitu pendidikan harus merata bagi seluruh rakyat, konsep pendidikan untuk semua yang dikembangkan aliran post modernisme perlu mendapatkan perhatian, khususnya untuk mengatasi persoalan pemerataan pendidikan. Pada mulanya, gerakan postmodernisme muncul sebagai kritik atas kegagalan kehidupan modernitas dalam menciptakan situasi sosial yang lebih baik, kondusif dan berkeadilan sosial (Ritzer, 2003). Hal ini dikarenakan filsafat posmodernisme memiliki anggapan bahwa modernisme membuat manusia kehilangan individualitas, kemandirian, dan konsep diri.

Post-modernisme merupakan paham yang menolak modernisme, karena modernisme menganggap adanya kebenaran yang universal bagi semua manusia. Sedangkan aliran postmodernisme menganggap bahwa tidak ada kebenaran yang universal bagi semua manusia. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan tidak lagi dipahami sebagai suatu proses mentransfer ilmu yang hanya dapat dilakukan di sekolah. Guru tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Guru berperan sebagai pembelajar

dan juga praktisi. Guru juga harus mampu membimbing anak untuk mampu mengemban tanggung jawab sosial maupun pribadi. Praktek-praktek pendidikan tidak harus dilakukan di sekolah, melainkan juga diperankan oleh masyarakat melalui alternatif pendidikan lain maupun pendidikan-pendidikan yang dilakukan di luar sekolah. Tujuan pendidikan menurut postmodernisme adalah mengembangkan identitas siswa yang memungkinkan mereka untuk memperjuangkan hak asasi dan melawan ketidakadilan.

Dalam konteks lainnya, aliran Marxisme juga memiliki pandangan tersendiri, terkait dengan konsep pendidikan untuk semua. Aliran Marxisme dalam filsafat pendidikan berpendapat bahwa baik kaum buruh maupun kaum pemilik modal, kedua-duanya berhak mendapatkan pendidikan yang layak guna membantu mereka manusia meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Marxisme menghendaki perubahan dari kapitalisme menjadi sosialisme dimana setiap orang mendapatkan hak yang sama, tidak ada marjinalitas. Marxisme menolah strata sosial yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut berimplikasi pada pengertian bahwa setiap lapisan masyarakat hendaknya mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dan setara. Sehingga tujuan dari pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia dapat tercapai (Ismail dan Basir, 2012).

Seorang pendidik menurut aliran marxisme adalah mereka yang berpendidikan dan mengajarkan pendidikan kepada peserta didik agar taraf hidup manusia meningkat, marxisme mengkritik pendidik yang mempertahankan status quo mereka dalam melakukan pengajaran kepada peserta didik. Sedangkan peserta didik menurut marxisme adalah mereka yang berasal dari kaum buruh maupun dari kaum pemilik modal yang mendapat materi dan pendidikan yang setara dan juga adil. Dalam pandangan Marx, sistem pendidikan itu keliru jika hanya melakukan pengajaran dan pendidikan hanya untuk memenuhi kepentingan orang-orang borjuis sedangkan dari kaum proleter tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana seharusnya. Dalam pendidikan yang menganut filsafat pendidikan marxisme, tujuan pendidikan adalah membangun karakter karakter manusia yang unggul, suatu kondisi mental yang dibutuhkan untuk membangun suatu masyarakat yang adil, sejahtera dan berpihak pada kaum yang tertindas. Tujuan pendidikan yang lain menurut Marxisme adalah masyarakat harus beralih dari kapitalisme ke sosialisme, membentuk sebuah kesadaran sosialis dan masyarakat sosialis serta berupaya ini meningkat dengan memberikan pendidikan untuk mengembangkan kesadaran sosialis pada manusia.

Berdasarkan perspektif teoritis tersebut, maka rekomendasi yang layak dikedepankan untuk mengatasi

permasalahan pembangunan pendidikan di daerah terpencil adalah

1. Pemerintah semestinya lebih meningkatkan prioritas pembangunan bidang pendidikan mengingat permasalahan pendidikan di Indonesia masih relatif besar dengan belum tercapainya target pendidikan dasar untuk semua. Strategi yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah meningkatkan alokasi APBN dan APBD untuk bidang pendidikan;
2. Pemerintah juga nampaknya melibatkan masyarakat dalam pembiayaan Wajib Belajar 9 Tahun. Akibatnya pendidikan dasar di Indonesia mahal karena subsidi pemerintah yang rendah, dan orang tua siswa harus menanggung biaya yang besar. Dalam kondisi seperti ini, lapisan masyarakat yang paling miskin akan mengalami kesulitan. Mengingat permasalahan ini, maka rekomendasi yang ditawarkan pemerintah hendaknya membuat peraturan tentang perpanjangan masa pakai buku pelajaran dan meningkatkan penyediaan buku pelajaran oleh pemerintah yang gratis; [L] [SEP]
3. Perbaikan infrastruktur pendidikan adalah kebutuhan mendesak, mulai dari gedung sekolah, jembatan, jalan beserta fasilitas lainnya.

4. Mendesak lembaga donor dan perusahaan multinasional untuk turut berperan dalam mewujudkan program *Education for All*. Untuk perusahaan multinasional misalnya melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*. [1] [SEP]

Education for All adalah suatu model pendidikan tanpa membedakan strata sosial, etnis, budaya, agama dan lainnya. Model pendidikan ini berbasis egaliterian, karena dalam implementasinya tidak didasarkan pada stratifikasi sosial, semuanya diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Konsep *Education for All* berarti suatu model pendidikan yang menekankan akan pentingnya pendidikan bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, orang kaya maupun orang miskin, sehingga dalam penerapan pendidikan itu tidak ada diskriminasi. Adanya *Education for All* diharapkan bisa membantu masyarakat yang kurang beruntung agar bisa mengenyam pendidikan.

Pendidikan seharusnya menjadi skala prioritas bagi agenda pembangunan pemerintah daerah. Melalui percepatan pembangunan pendidikan yang menyentuh segala aspek dan dinamika pendidikan diharapkan akan mampu mengangkat kualitas pendidikan di daerah. Pembangunan pendidikan di daerah harus bersifat adil, partisipatif dan terintegrasi, sehingga kesenjangan mutu yang ada saat ini dapat diatasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Berbagai kebijakan dan program kerja yang telah dan sedang diluncurkan pemerintah daerah maupun

pemerintah pusat, semuanya itu tujuannya hanya pada upaya pencapaian tingkat kualitas pendidikan. Walaupun di satu sisi, untuk mengatasi ketertinggalan mutu pendidikan suatu daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah itu sendiri, namun pemerintah pusat lebih berperan untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi.

B. Masalah Pokok Pendidikan

Permasalahan pendidikan merupakan suatu kendala yang menghalangi tercapainya tujuan pendidikan. Pada bab ini akan dibahas beberapa hal yang merupakan permasalahan pendidikan di Indonesia. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pemerataan Pendidikan
2. Mutu dan Relevansi Pendidikan
3. Efisiensi dan Efektifitas Pendidikan

Berikut ini adalah penjelasan-penjelasan mengenai 3 poin permasalahan pendidikan di atas.

1. Pemerataan Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemerataan berasal dari kata dasar rata, yang berarti: 1) meliputi seluruh bagian, 2) tersebar kesegala penjuru, dan 3) sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap

pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak lokasi geografis.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Pemerataan Pendidikan merupakan tujuan pokok yang akan diwujudkan. Jika tujuan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pelaksanaan pendidikan belum dapat dikatakan berhasil. Hal inilah yang menyebabkan masalah pemerataan pendidikan sebagai suatu masalah yang paling rumit untuk ditanggulangi.

Permasalahan Pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan

untuk melakukan proses pendidikan, hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah, tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini.

2. Mutu dan Relevansi Pendidikan

Mutu sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Jadi pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Sedangkan relevan berarti bersangkutan paut, kait, mangait, dan berguna secara langsung.

Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu untuk setiap jenjang pendidikan melalui persekolahan juga dilaksanakan. Peningkatan mutu ini diarahkan kepada peningkatan mutu masukan dan lulusan, proses, guru, sarana dan prasarana, dan

anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan.

Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor terpenting yang mempengaruhi adalah mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Hasil-hasil pendidikan juga belum didukung oleh sistem pengujian dan penilaian yang melembaga dan independen, sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara objektif dan teratur. Uji banding antara mutu pendidikan suatu daerah dengan daerah lain belum dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga hasil-hasil penilaian pendidikan belum berfungsi untuk penyempurnaan proses dan hasil pendidikan.

Selain itu, kurikulum sekolah yang terstruktur dan sarat dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Pelaksanaan pendidikan seperti ini tidak mampu memupuk kreatifitas siswa untuk belajar secara efektif. Sistem yang berlaku pada saat sekarang ini juga tidak mampu membawa guru dan dosen untuk melakukan pembelajaran serta pengelolaan belajar menjadi lebih inovatif.

Akibat dari pelaksanaan pendidikan tersebut adalah menjadi sekolah cenderung kurang fleksibel, dan tidak mudah berubah seiring dengan perubahan waktu dan masyarakat. Pada pendidikan tinggi, pelaksanaan kurikulum ditetapkan pada penentuan cakupan materi

yang ditetapkan secara terpusat, sehingga perlu dilaksanakan perubahan kearah kurikulum yang berbasis kompetensi, dan lebih peka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Dibanding negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia memiliki masalah yang sangat mendasar.

Melihat permasalahan tersebut, maka dibutuhkanlah kerja sama antara lembaga pendidikan dengan berbagai organisasi masyarakat. Pelaksanaan kerja sama ini dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dapat dilihat jika suatu lembaga tinggi melakukan kerja sama dengan lembaga penelitian atau industri, maka kualitas dan mutu dari peserta didik dapat ditingkatkan, khususnya dalam bidang akademik seperti teknologi industri.

3. Efisiensi dan Efektifitas Pendidikan

Sesuai dengan pokok permasalahan pendidikan yang ada selain sasaran pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, maka ada satu masalah lain yang dinggap penting dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu efisiensi dan efektifitas pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan dipandang dari segi internal pendidikan. Maksud efisiensi adalah apabila

sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Artinya pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumberdaya yang ada, seperti uang, waktu, tenaga dan sebagainya.

Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga dan biaya tepat sasaran, dengan lulusan dan produktifitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, dimana pemanfaatan segala sumberdaya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani.

Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan dimana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana / program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif.

Tujuan dari pelaksanaan pendidikan adalah untuk mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin, terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya. Dari tujuan tersebut, pelaksanaan pendidikan Indonesia menuntut untuk menghasilkan peserta didik yang

memeiliki kualitas SDM yang mantap. Ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan ini akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran.

Penanggulangan masalah pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas tenaga pengajar. Jika kualitas tenaga pengajar baik, bukan tidak mungkin akan menghasilkan lulusan atau produk pendidikan yang siap untuk menghadapi dunia kerja. Selain itu, pemantauan penggunaan dana pendidikan dapat mendukung pelaksanaan pendidikan yang efektif dan efisien. Kelebihan dana dalam pendidikan lebih mengakibatkan tindak kriminal korupsi dikalangan pejabat pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang lebih terorganisir dengan baik juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pendidikan seperti ini akan lebih bermanfaat dalam usaha penghematan waktu dan tenaga.

C. Faktor Pendukung Masalah Pendidikan

Masalah pokok pendidikan akan terjadi di dalam dalam bidang pendidikan itu sendiri. Jika di analisis lebih jauh, maka sesungguhnya permasalahan pendidikan berkaitan dengan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya masalah itu. Adapun faktor-faktor yang dapat menimbulkan permasalahan pokok pendidikan tersebut adalah sebagai berikut.

1. IPTEK

2. Laju Pertumbuhan Penduduk
3. Permasalahan Pembelajaran

1. IPTEK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini berdampak pada pendidikan di Indonesia. Ketidaksiapan bangsa menerima perubahan zaman membawa perubahan terhadap mental dan keadaan negara ini. Bekembangnya ilmu pengetahuan telah membentuk teknologi baru dalam segala bidang, baik bidang social, ekonomi, hokum, pertanian dan lain sebagainya.

Sebagai negara berkembang Indonesia dihadapkan kepada tantangan dunia global. Dimana segala sesuatu dapat saja berjalan dengan bebas. Keadaan seperti ini akan sangat mempengaruhi keadaan pendidikan di Indonesia. Penemuan teknologi baru di dalam dunia pendidikan, menuntut Indonesia melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan reformasi tidaklah mudah, hal ini sangat menuntut kesiapan SDM Indonesia untuk menjalankannya.

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap masalah pemerataan serta mutu dan relevansi pendidikan. Pertumbuhan penduduk ini akan berdampak pada jumlah peserta didik. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak

dibutuhkan sekolah-sekolah untuk menampungnya. Jika daya tampung suatu sekolah tidak memadai, maka akan banyak peserta didik yang terlantar atau tidak bersekolah. Hal ini akan menimbulkan masalah pemerataan pendidikan.

Tetapi apabila jumlah dan daya tampung suatu sekolah dipaksakan, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara tenaga pengajar dengan peserta didik. Jika keadaan ini dipertahankan, maka mutu dan relevansi pendidikan tidak akan dapat dicapai dengan baik.

Sebagai negara yang berbentuk kepulauan, Indonesia dihadapkan kepada masalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Tidak heran jika perencanaan, sarana dan prasarana pendidikan di suatu daerah terpencil tidak terkoordinir dengan baik. Hal ini diakibatkan karena lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap daerah tersebut. Keadaan seperti ini adalah masalah lainnya dalam bidang pendidikan. Keterkaitan antar masalah ini akan berdampak kepada keadaan pendidikan Indonesia.

3. Permasalahan Pembelajaran

Pelaksanaan kegiatan belajar adalah sesuatu yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dalam kegiatan belajar formal ada dua subjek yang berinteraksi, yaitu pengajar/pendidik (guru/dosen) dan peserta didik (murid/siswa, dan mahasiswa).

Pada saat sekarang ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan cenderung pasif, dimana seorang pendidik selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu. Hal ini akan menimbulkan kejengahan terhadap peserta didik. Sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi tidak menarik dan cenderung membosankan. Kegiatan belajar yang terpusat seperti ini merupakan masalah yang serius dalam dunia pendidikan.

Guru/dosen yang berpandangan kuno selalu menganggap bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan materi, sedangkan tugas siswa/mahasiswa adalah mengerti dengan apa yang disampaikannya. Bila peserta didik tidak mengerti, maka itu adalah urusan mereka. Tindakan seperti ini merupakan suatu paradigma kuno yang tidak perlu dipertahankan.

Dalam hal penilaian, Pendidik menempatkan dirinya sebagai penguasa nilai. Pendidik bisa saja menjatuhkan, menaikkan, mengurangi dan mempermainkan nilai perolehan murni seorang peserta didik. Pada satu kasus di pendidikan tinggi, dimana seorang dosen dapat saja memberikan nilai yang diinginkannya kepada mahasiswa tertentu, tanpa mengindahkan kemampuan atau skill yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Proses penilaian seperti sungguh sangat tidak relevan.

Bagian Kedua

Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi

Para pakar ekonomi klasik seperti Malthus, Ricardo dan Mill mengemukakan pandangan yang optimistik bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terdapat hubungan yang bersifat resiprokal (*reciprocal relationship*) atau saling mempengaruhi satu sama lain (Danim, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pembangunan ekonomi mempunyai hubungan yang interaktif, pendidikan bisa dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, sebaliknya pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pembangunan pendidikan. Dari penjelasan di atas, dapatlah dipahami bahwa pendidikan dan ekonomi mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi.

Hubungan tersebut menunjukkan suatu keterkaitan atau saling keterkaitan antara pendidikan dengan ekonomi, sehingga yang satu memerlukan yang lain. Pendidikan memerlukan ekonomi dan ekonomi juga memerlukan pendidikan. Agar ekonomi masyarakat meningkat diperlukan kualitas sumberdaya manusia yang

mampu mendorong peningkatan kehidupan ekonomi. Kualitas sumberdaya manusia atau *Human Capital* dapat meningkat bila pendidikan berkembang, dan perkembangan pendidikan ini tidak terlepas dari investasi yang dikeluarkan, baik investasi individu maupun investasi publik yang dianggarkan oleh pemerintah,

Kehidupan ekonomi masyarakat merupakan cerminan dari para pelaku ekonominya baik dalam produksi, konsumsi, maupun distribusi. Tingkat kondisi ekonomi ini jelas akan berbeda-beda sesuai dengan bagaimana pelaku ekonomi melakukan aktivitas ekonominya, sebaliknya tingkat dan kualitas pendidikan pada suatu masyarakat akan ditentukan oleh berapa besar pengorbanan yang diberikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan tersebut, baik dalam bentuk tenaga maupun dana, baik secara individual maupun masyarakat/negara, dan besarnya alokasi dana yang diberikan untuk pendidikan akan mencerminkan kemampuan ekonomi individu dan ekonomi masyarakat/negara.

Dengan demikian antara ekonomi dengan pendidikan terdapat suatu keterkaitan dimana peningkatan dalam salah satunya akan mendorong peningkatan yang lainnya. Dalam hasil penelitian dan tulisan tentang ekonomi pendidikan masalah hubungan antara pendidikan dengan ekonomi menjadi perhatian penting, Menurut Anderson dan Windham (1982) dalam literatur awal tentang ekonomi pendidikan dan *Human*

Capital cenderung menjadikan pendidikan sebagai instrumen yang dapat dipergunakan untuk mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi (*tended to make education into an instrument capable of being manipulated to achieve higher level of economic development*), ini berarti bahwa pendidikan merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan dalam statu kegiatan pembangunan, artinya akan sangat sulit bila pendidikan dan ekonomi dibangun sendiri-sendiri dalam urutan waktu, Namun keduanya mesti dibangun secara bersamaan, sudah tentu dengan memperhatikan bidang-bidang kehidupan lainnya.

Pendidikan dan ekonomi merupakan suatu hal yang berbeda, pendidikan merupakan usaha memberikan bimbingan dan latihan guna meningkatkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki manusia, sedangkan ekonomi merupakan bidang kehidupan yang berkaitan dengan upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, namun demikian keduanya punya keterkaitan dan hubungan timbal balik. Pendidikan memerlukan kondisi ekonomi yang menopangnya dan ekonomi memerlukan pendidikan guna meningkatkan dan membangunnnya.

Oleh karena itu keterkaitan antara pendidikan dan ekonomi merupakan sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi, mengingat keduanya saling membutuhkan. Pendidikan bisa dilihat sebagai variabel bebas (yang mempengaruhi) juga sebagai variabel terikat (yang dipengaruhi, demikian juga halnya dengan ekonomi, seperti dikemukakan oleh. Field (Anderson dan

Duglas Windham, 1982) bahwa "*educational growth causes economic growth and economic growth permits educational growth*". meskipun demikian, dalam tataran praktis faktor mana yang paling berpengaruh sulit dipisahkan/diurai dengan jelas, namun dalam tataran teori perbedaan/penguraian tersebut diperlukan untuk kepentingan analisis.

Diakui oleh para ahli bahwa pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kehidupan ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa negara-negara yang secara ekonomi maju, masyarakatnya mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi/lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang ekonominya belum maju.

Dengan mengingat hal tersebut, para ahli berpendapat bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat akan mampu mendorong kehidupan ekonomi lebih maju. Pendidikan menjadikan manusia terdidik dan trampil sehingga partisipasinya dalam kehidupan ekonomi atau pembangunan ekonomi akan makin produktif, dan produktivitas yang tinggi akan menjadikan pembangunan ekonomi meningkat.

Todaro (1983) mengemukakan bahwa hampir semua para ahli ekonomi akan sependapat bahwa bagi suatu bangsa, sumberdaya manusia yang pada akhirnya menentukan karakter dan langkah pembangunan ekonomi dan sosialnya, bukan modal dan bukan pula sumber-sumber materialnya. Dari pendapat tersebut

nampak bahwa sumber daya manusia (SDM) adalah faktor yang menentukan/mempengaruhi pembangunan/kehidupan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang hanya bisa dilakukan melalui pendidikan, akan dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dari suatu bangsa.

Adam dan Robert (1982) menyatakan bahwa beberapa ahli menggunakan pendidikan sebagai standar keberhasilan pembangunan, yang mereka maksudkan, pendidikan yang mempunyai korelasi tinggi dengan peningkatan GNP per kapita dan sebagai standar kecenderungan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi sejajar dengan kemajuan pendidikan. Sementara itu Harbison dan Myer (Adam, 1982) berpendapat bahwa pendidikan berarti sejajar dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara keduanya tidak ditentukan mana yang jadi penyebab, dan barangkali kemajuan ekonomi membawa pendidikan ke orang yang lebih formal.

Kemajuan suatu kehidupan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, meskipun secara esensial semua itu tergantung pada bagaimana manusianya dalam menjalankan kehidupan ekonominya. Kualitas manusia dengan demikian menjadi faktor penentu maju mundurnya kehidupan ekonomi masyarakat. Namun demikian bagaimana mengukur kontribusi atau pengaruh pendidikan pada kehidupan ekonomi, merupakan hal yang sulit. Dalam hubungan ini para ahli telah berusaha

mencari cara untuk melihat pengaruh pendidikan pada ekonomi.

Dalam upaya pencarian tersebut paling tidak ada tiga pendekatan (Sutisna, 1980) untuk melihat sumbangan kongkret dari pendidikan kepada pertumbuhan ekonomi yaitu :

1. Pendekatan residual; yaitu pendekatan dengan cara menghitung sumbangan-sumbangan modal, input, tenaga kerja dan sumber-sumber fisik kepada pertumbuhan produksi dan apapun yang tertinggal (residu) dianggap berasal dari faktor manusia (pendidikan).
2. Pendekatan Korelasi; yaitu pendekatan yang menggunakan perbandingan antar negara dengan mengaitkan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan tingkat kehidupan ekonomi.
3. Pendekatan perolehan pendidikan yang melihat kontribusi pendidikan melalui penghasilan orang yang terdidik.

Ketiga pendekatan tersebut pada dasarnya melihat pendidikan sebagai variabel atau faktor yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat, kecuali pendekatan korelasional, dimana keduanya beposisi setara..

Disamping itu pengaruh pendidikan terhadap ekonomi juga dapat dilihat dari sudut pendidikan sebagai sebuah industri. Cohn (1979) menyatakan *Education is a*

gigantic Industry in the united states. Pendidikan mempekerjakan banyak orang dari mulai guru, siswa, dan pekerja lainnya yang mendapat penghasilan dari sektor pendidikan. Dengan demikian sektor pendidikan banyak menyerap tenaga kerja, dan ini berarti dapat membantu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.

Screening (Credentials), dalam pendekatan ini investasi pendidikan mempengaruhi pendapatan tidak melalui produktivitas melainkan melalui diperolehnya credential/ijazah yang dapat menjadi dasar dalam screening, atau dalam penentuan seleksi pegawai yang akan diterima bekerja.

Dengan memperhatikan penjelasan di atas, nampak bahwa pendidikan akan menghasilkan pekerja yang lebih trampil, makin produktif dan punya credential/berijazah tinggi, akibatnya mereka akan memperoleh penghasilan/pendapatan yang tinggi/lebih tinggi.

Dimensi lain dari peranan dan pengaruh pendidikan terhadap kehidupan ekonomi adalah dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dalam bentuk meningkatnya Pendapatan Nasional perkapita, penyerapan tenaga kerja serta bentuk-bentuk lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.

Menurut Fields (Anderson, 1982) Pendidikan merupakan indikator penting kinerja suatu negara, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Manfaat

pendidikan harus dimasukkan dalam analisis tentang sumbangan pendidikan pada pembangunan. Pendidikan punya nilai penting karena dapat meningkatkan kegiatan produktif di masa depan, untuk itu analisis biaya-manfaat dapat membantu dalam menilai potensi investasi pendidikan. Dengan demikian adalah tidak mungkin suatu pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik apabila terjadi kekurangan modal manusia sebagai hasil pendidikan, oleh karena itu pendidikan menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi, karena dapat meningkatkan produktivitas bangsa, dimana peningkatan ini jelas akan mampu mempercepat peningkatan pembangunan ekonomi

Manfaat pendidikan adalah sesuatu yang dapat diberikan oleh pendidikan, baik untuk manfaat ekonomi maupun manfaat social, manfaat ekonomi bias bersifat individual maupun manfaat public. Menurut Johns, et.al (1983) *“The benefits of education may be broadly defined as including anything which a. increase production through enhancement of capacity of the labor force; b. increase efficiency by reducing cost, thus reserving or releasing resources for other productive pursuits; and c. Increase the social consciousness of community so that the standard of living is enhanced”*. Jadi secara umum pendidikan dapat memberikan manfaat besar bagi kemajuan hidup manusia melalui peningkatan produksi, peningkatan efisiensi, serta peningkatan kesadaran perlunya perbaikan standar kehidupan.

Sementara itu dalam kaitan dengan Pendidikan Tinggi, manfaat pendidikannya juga besar, dan untuk mengetahuinya dapat dilakukan dengan cara mengestimasi/memperkirakan manfaat yang akan diperoleh. Dalam memperkirakan manfaat/hasil Pendidikan Tinggi, terdapat tiga cara yang dapat dipergunakan sebagaimana diungkapkan oleh Leslie dan Brinkman dalam bukunya *The Economic Value of Higher Education* (1993) yang menyatakan bahwa *There are Three major ways to estimate the monetary yields of College Education*:

- a. Earning Differensials.
- b. Net Present Value (NPV)
- c. Private rate of Return

Cara ini mencoba melihat hasil pendidikan tinggi secara moneter dengan membandingkan antara rata-rata penghasilan yang diperoleh lulusan pendidikan tinggi dengan rata-rata penghasilan yang diperoleh oleh mereka yang bukan lulusan Pendidikan Tinggi. Asumsi cara ini adalah bahwa semakin tinggi Pendidikan, semakin tinggi Penghasilan/pendapatan.

Adanya hubungan langsung antara tingkat pendidikan dengan penghasilan, artinya variasi dalam tingkat pendidikan dapat dijadikan dasar untuk menjelaskan variasi dalam penghasilan. Implikasi dari cara ini adalah bahwa jika terjadi ketidakmerataan dalam penghasilan, maka pendidikan bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi ketidakmerataan dalam distribusi

pendapatan. Oleh karena itu, cara ini nampaknya bersesuaian dengan salah satu teori distribusi pendapatan dengan pendapatan *Human Capital*.

Premis dasar dari pendekatan *Human Capital* adalah "... *that variation in labor income are due to difference in labor quality* (Cohn, 1979), dan perbedaan kualitas pekerja itu salah satu penyebabnya adalah pendidikan. Dalam Teori modal manusia (*human capital*) Secara konseptual modal manusia menjelaskan proses dimana pendidikan memiliki pengaruh positif pada pembangunan ekonomi. Becker (1965) menyatakan bahwa manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, yang diukur dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan dampaknya ekonomi nasional akan bertumbuh lebih tinggi.

Menurut Romer (1988), modal manusia merujuk pada stok pengetahuan dan keterampilan seseorang. Pendidikan adalah satu cara dimana individu dapat meningkatkan kualitasnya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, diharapkan stok modal manusianya semakin tinggi. Karena diyakini kualitas SDM yang baik berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Barro dan Lee (1993), Mankiw dan kawan-kawan (1991) menjabarkan tingkat pendidikan biasanya diukur dengan persentase tenaga kerja yang berpendidikan tinggi terhadap jumlah tenaga kerja atau penduduk yang terdaftar (*enrollment*) pada suatu tingkat pendidikan tertentu. Berbeda dengan Barro dan Mankiw. Nehru, Swanson, dan Dubey (1995) yang mendasarkan pandangannya pada akumulasi lama sekolah siswa yang dapat bekerja, karena jika hanya berdasarkan pada tenaga kerja berpendidikan tinggi yang terdaftar maka ada kesulitan untuk menjelaskan hubungan tersebut. Karena banyak orang dewasa yang terlibat dalam pendidikan formal dan pelatihan untuk meningkatkan produktifitasnya. Sedangkan UNDP dalam formula HDI (*Human Development Index*) memproksi pendidikan dengan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf.

Psacharopoulos, 1972 (Todaro, 2000) membuktikan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap promosi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kesehatan, pendidikan dan nutrisi bukan hanya mampu meningkatkan kapabilitas saja, namun juga merupakan sarana penting dalam meningkatkan *Human Capital* di masa yang akan datang. Peningkatan pendidikan secara umum dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Beragam pandangan di atas memandang pendidikan (kualitas SDM) dan ekonomi sebagai

ukurannya. Sedangkan Sen (1989) memandang pendidikan bukan hanya semata untuk kepentingan ekonomi tetapi lebih jauh adalah bagian terpenting dari kompetensi dan kedaulatan manusia. Institusi pendidikan, investasi bidang pendidikan, kualitas pendidikan dan akses yang sama terhadap pendidikan berperan sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Chaudhry & Rehman, 2009) mengatakan investasi pendidikan meningkatkan GNP per kapita, mengurangi kemiskinan dan mendukung penyebaran ilmu pengetahuan. Pendidikan juga berperan signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan (Danacica, et.al, 2010). Ia juga membantu mengurangi tingkat kriminal, terorisme dan tenaga kerja anak melalui pengurangan kemiskinan yang akhirnya dapat mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan.

Bagian Ketiga

Pendidikan Sebagai Investasi Sumber Daya Manusia

Investasi Sumber Daya Manusia di suatu negara bukanlah merupakan investasi individu melainkan investasi negara bagi pembangunan sumber daya manusia warga negaranya agar mereka mampu berdaya saing tinggi secara riil mampu mensejahterakan dirinya. Investasi sumber daya manusia ini memang berakses pada investasi pendidikan yang secara perspektif dapat merupakan kontribusi pendidikan bagi pembangunan.

Pendidikan dianggap sebagai suatu alat utama untuk meningkatkan kesadaran politik dan sosial dan menyediakan tenaga terlatih untuk proses produksi dalam perekonomian modern. Di awal tahun 2000, pandangan umum tentang pembangunan telah diperluas; urusan produksi yang lebih besar telah ditambah dengan urusan kesejahteraan manusia dan pengurangan kemiskinan. Pendidikan dilihat sebagai kebutuhan dasar manusia, sebagai suatu alat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya dan sebagai kegiatan yang

mempertahankan dan mempercepat pembangunan secara keseluruhan.

Pembangunan sumber daya manusia suatu negara adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan dan untuk penggunaan yang efektif atas sumberdaya modal fisiknya. Pendidikan-investasi dalam modal manusia adalah suatu komponen integral dari semua upaya pembangunan sehingga dikatakan harus melalui suatu spectrum yang luas dalam isi dan bentuk. Indonesia sebagai Negara berkembang mendidik lebih banyak penduduknya daripada yang pernah dilakukan sebelumnya. Ratio pendaftaran di semua tingkat telah meningkat hingga suatu keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya sementara pengeluaran biaya oleh pemerintah di sector pendidikan terus meningkat. Berbagai upaya yang sungguh-sungguh telah dilakukan untuk memperbaiki efisiensi dan mutu system pendidikan dan untuk meningkatkan relevansi pendidikan demi kebutuhan nasional. Meskipun demikian masih sangat banyak penduduk yang belum memiliki kesempatan memperoleh pendidikan.

"Human" di dalam kamus *Paradox Runtime* diartikan sebagai *manusia*. Sumaatmadja (2005) pakar Sosiolog mendefinisikan manusia secara spesifik sebagai suatu fenomena yang sama dengan makhluk lainnya mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati dan seterusnya. Namun manusia memiliki pembeda

dengan makhluk lainnya yakni melekat fenomena alam dan juga fenomena budaya, inilah keunikan manusia.

Dengan definisinya tersebut, Sumaatmadja lebih lanjut mengungkapkan bahwa dalam proses pertumbuhan jasmani dan rohaninya manusia memiliki otonomi dirinya ia mampu memanfaatkan kemampuannya secara alamiah bagi kepentingan individu, namun dalam kepentingan sosial selaku makhluk sosial pertumbuhan individu pemanfaatannya tidak hanya untuk kepentingan pribadi melainkan juga untuk kepentingan bersama, kepentingan masyarakat dan bangsa.

Drijarkara (2007) mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk yang dinamis, ia tidak pernah berhenti melainkan tetap aktif, kedinamisannya akan tetap berkembang selama mereka hidup. Oleh kedinamisannya itu maka melalui kelembagaan manusia akan melakukan pengembangan yang dikenal dengan pengembangan sumber daya manusia dan kadangkala disebutkan sebagai pembangunan manusia seutuhnya. Dalam bentuk mencapai kedudukannya yang lebih tinggi, baik vertikal maupun horizontal perilaku kedimaisan manusia akan membawanya pada taraf hidup yang lebih baik.

Toffler (2003) mengungkapkan kedinamikaan manusia dari waktu ke waktu senantiasa berada di dalam kelompoknya. Manusia berangkat dari sistem ekonomi yang sederhana yang kita kenal dengan *simple good gathering economics* kemudian berubah ke sistem ekonomi

yang lebih maju yang dikenal dengan *pastoralism economics* perkembangan inipun tidak lama karena manusia lebih cepat untuk beralih ke sektor industri dan saat ini sudah berada pada taraf masyarakat informasi (*information societies*) perubahan ini dikenalkan Toffler sebagai perubahan gelombang.

Dengan memahami kedinamisan manusia yang demikian maka tidak bisa dihindari bahwa manusia senantiasa tumbuh dan berkembang dan dalam prosesnya itu diperlukan berbagai sumber daya yang akan mampu mendukung pertumbuhan manusia. Muhajir dalam Suryono (2008) mengungkapkan bahwa pertumbuhan manusia harus berakses peningkatan kualitasnya baik dalam fisik maupun mentalnya, sehingga akan diperoleh keselarasan antara sumber daya alam yang tersedia dengan kemampuan sumber daya manusianya.

Dengan pendapatnya tersebut, Muhajir mengkonfrontir eksploitasi terhadap sumber daya alam yang digunakan secara semena-mena dan mengabaikan dimensi manusiawi dalam pengembangan diri dan pemanfaatannya. Hal inipun direspon secara positif oleh Mulyadi (2008) bahwa pemanfaatan sumber daya manusia harus diprioritaskan, karena manusia harus dibangun profesionalitasnya maupun kematangan kepribadiannya sehingga akan memeperkuat satu sama lainnya.

Oleh karena itu menurut Mulyadi (2008), ada 4 kebijaksanaan yang harus diupayakan dalam peningkatan

SDM yakni peningkatan kualitas hidup yang meliputi jasmani, rohani dan kejuangan maupun kualitas kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat; peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya penyebaran perataannya; peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan; dan pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan perangkat hukum.

Adapun peningkatan kualitas hidup terdiri dari:

1. Pembangunan pendidikan, akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi di masa datang, dalam arti responsive terhadap dinamika pembangunan dan permintaan pasar kerja sehingga sesuai dengan kebutuhan (*demand driven*).
2. Pembangunan kesehatan, mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan dan mutu pelayanan kesehatan.
3. Menumbuhkan sektor produktif serta mendorong semangat kemandirian untuk bersama melepaskan diri dari kemiskinan.

Di era global seperti saat ini dilihat dari prospek pendidikan akan berdampak pada cepat usangnya *hardware* dan *software* bidang pendidikan. Hal ini berarti bahwa pendidikan adalah sesuatu yang harus

diberdayakan setiap saat dan ini semua menuntut adanya *political will* yang kuat dari pembuat keputusan yakni pemerintah dan konsekuensinya pendidikan harus digunakan sebagai investasi bagi pencapaian peningkatan kualitas produk dan *outcome* pendidikan nasional.

Sementara investasi sumber daya manusia didefinisikan oleh Suyanto (2006) sebagai sebuah aktivitas yang tidak bersifat *quick yield* dan akan dirasakan hasilnya dalam jangka panjang. Dengan pendapatnya ini investasi sumber daya manusia menurutnya tidak hanya menciptakan permintaan akan tetapi memperbesar kapasitas. Penjelasan Suyanto ini sebenarnya merupakan penjabaran dari beberapa ahli ekonomi sumber daya manusia seperti Adam Smith (1776) tokoh ekonomi klasik yang mengungkapkan bahwa investasi sumber daya manusia merupakan alokasi biaya yang akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh akumulasi modal secara fisik baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tetap tumbuh, investasi sumber daya manusia merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi. Smith meyakini bahwa kesejahteraan manusia akan tercipta dari seberapa besar investasi yang disebutnya sebagai pengorbanan yang dikontribusikan pada dirinya berdampak positif terhadap kerja dan spesialisasi.

Selain Adam Smith, Harrod-Domar (1986) beranggapan bahwa investasi terhadap manusia

merupakan jumlah sumber daya yang ditanamkan pada manusia untuk menciptakan permintaan, memperbesar kapasitas produksi dan menciptakan surplus. Disini dijelaskan bahwa peran modal fisik manusia amat besar, tetapi kapasitasnya hanya dapat meningkat apabila sumber daya pendukungnya juga besar sehingga model ini dikenal dengan model fungsi produksi.

Hoover (1998) berpendapat bahwa investasi yang negatif terhadap sumber daya manusia akan mengakibatkan menurunnya permintaan agregatif yang merupakan factor utama kemiskinan karena dengan investasi yang negatif ini maka modal fisik berhubungan tidak linier dengan pembangunan khususnya pada semua angkatan kerja. Hoover meyakini bahwa jumlah penduduk akan menentukan penawaran kerja. Sedangkan komposisi penduduk akan menggambarkan kualitas penduduk yang akan memasuki pasaran kerja.

Djam'an (2008) mengungkapkan bahwa investasi yang paling merugikan adalah bila anak didik tidak ulet, cepat putus asa, tidak rajin bekerja, malas membuat tugas-tugas sekolah, nantinya akan menjadi manusia yang tidak produktif, tidak memiliki daya saing apalagi bekerja, inilah sebuah keadaan negara yang akan merugi.

Dengan demikian Investasi pendidikan akan berdampak positif terhadap:

1. Keterbelakangan ekonomi, karena dampaknya pada peningkatan kemampuan manusia dan motivasi manusia untuk berprestasi.

2. Pendidikan berfungsi menyiapkan salah satu input dalam proses produksi yaitu tenaga kerja agar dapat bekerja dengan produktif karena kualitasnya. Hal ini selanjutnya akan mendorong peningkatan output yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan penduduk.
3. Kombinasi antara investasi modal manusia dan modal fisik diharapkan akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Mulyadi (2008) mempertegas terhadap investasi sumber daya manusia bahwa investasi memacu *labor productivity* yang merupakan titik singgung antara produktifitas SDM dengan pertumbuhan ekonomi dan berasumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan semakin tinggi produktifitas tenaga kerja dan semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan pendapatnya ini maka investasi sumber daya manusia akan senantiasa berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi.

Suryono (2008) mengungkapkan investasi terhadap sumber daya manusia dapat dilakukan antara lain dengan pendidikan, maupun pendidikan dan pelatihan. Akan tetapi investasi sumber daya manusia tidak akan terlepas dari kendala biaya, karena dana yang ada terbatas. Dengan demikian dapat dikemukakan karakteristik dari investasi sumber daya manusia antara lain: mengandung resiko biaya; sifatnya jangka panjang sehingga

manfaatnya baru dapat dirasakan dalam waktu yang lama; resiko bahwa pendidikan yang ditempuh kemungkinan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Meskipun demikian investasi sumber daya manusia memberikan pilihan aplikasi berbiaya murah yang cukup bervariasi karena tidak semua investasi sumber daya manusia itu harus dilakukan dengan melalui pendidikan yang mahal. Alternatif pilihan untuk investasi sumber daya manusia dapat disebutkan antara lain a). Pendidikan formal yang berjenjang dan bertingkat seperti TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi; dan pendidikan non formal seperti pelatihan.

Human capital atau modal sumber daya manusia yang merupakan sebuah pengukuran terhadap sumber daya manusia yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal atau barang modal sebagaimana barang-barang modal lainnya, seperti tanah, gedung, mesin, dan sebagainya. *Human capital* dapat didefinisikan sebagai jumlah total dari pengetahuan, skill, dan kecerdasan rakyat dari suatu negara.

Tujuan dari pengukuran *human capital* adalah untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Walaupun kontroversi mengenai diperlakukannya *human investmen* sebagai *human capital* belum terselesaikan, namun beberapa ekonom klasik dan neo-klasik seperti Adam Smith, Von Thunen, dan Alfred Marshall sependapat bahwa *human capital* terdiri dari kecakapan-kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan

dan berguna bagi semua anggota masyarakat. Kecakapan-kecakapan tersebut merupakan kekuatan utama bagi pertumbuhan ekonomi.

Di samping masih adanya perbedaan pendapat mengenai konsep *human capital*, juga terdapat perbedaan pendapat mengenai pengukurannya. Menurut Bowman (2001), perbedaan pendapat tersebut bersumber pada dua hal, yaitu pertama mengenai persoalan apakah kapital (*human capital*) itu sebagai persediaan (*store*) ataukah sebagai input terhadap produksi. Kedua, berkenaan dengan pembobotan. Dalam pembobotan ini terlihat adanya upaya-upaya untuk memperlakukan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif dalam satuan-satuan *human capital*.

Namun belum ada kesepakatan mengenai perlakuan pengukuran kuantitatif dalam *human capital*. Suatu ukuran pendidikan yang diwujudkan dalam *labor force* dapat digunakan untuk mengubah kualitas menjadi kuantitas. Komponen-komponen pendidikan kemudian menjadi variabel yang spesifik yang dapat dibandingkan dengan kapital fisik, dan ukuran angkatan kerja dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai konsekuensinya, maka satuan kapital didefinisikan dalam pengertian yang terbatas, yaitu dalam *labor force*, yang dapat diukur dengan beberapa cara, antara lain ialah:

1. *Number of school years*
2. *Efficiency-equivalence units*
3. *Base-year lifetime earned income*

4. *Approximations to base year real cost*

5. *Approximations to current real cost*

Ada beberapa *persoalan* pengukuran pembentukan human capital menurut pendekatan dasar biaya. Ukuran-ukuran pembentukan kapital neto menemui beberapa kesulitan, antara lain.

1. Berkenaan dengan masalah kompleksnya hubungan antara konsumsi dan investasi.
2. Adalah berkenaan dengan bagaimana memperlakukan pengangguran dalam memperkirakan *opportunity cost*.

Dalam konsep *human capital*, manusia dianggap sebagai modal karena mutu modal manusia merupakan suatu komoditi yang dapat dihasilkan dan diakumulasi. Pengorbanan yang dikeluarkan baru dapat memberi hasilnya pada masa datang. Oleh karena itu disini digunakan istilah modal. Sumber daya manusia yang sudah mengalami pengolahan lebih lanjut disebut modal manusia. Penggunaan modal manusia juga menyiratkan suatu perhatian pada pengolahan sumber daya, manusia yang juga merupakan suatu investasi. Karena modal manusia tidak dapat diukur kita tidak mempunyai jumlah atas modal manusia akan tetapi yang kita bicarakan adalah mutunya. Tampak bahwa mutu modal manusia berbeda dengan produktifitasnya baik dalam analisis ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Peningkatan mutu modal manusia dapat menaikkan produktifitasnya

akan tetapi kenaikan produktifitasnya belum tentu berasal dari kenaikan mutu modal.

Agar lebih memperjelas konsep *human investmen*, maka kita perlu juga memahami *capital investmen* dimana *human investmen* tidak akan dapat tercapai optimal apabila tidak didukung dengan *capital investment*, dimana pada *capital investmen* lebih cenderung pendekatannya melalui pendekatan ekonomi dan kita kenal dengan padat modal. Perbedaan yang mendasar antara *human investmen* dnegan *capital investmen* adalah tujuan akhirnya dimana pada *human investmen* tujuan akhir dari investasi adalah sumber daya manusia sementara *capital* tujuan akhir investasinya adalah efisiensi dan produktifitas sumber daya selain manusia.

Bagian Keempat

Selayang Pandang: Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan

Perioritas pengeluaran pemerintah dalam pembangunan manusia sektor pendidikan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengelolaan layanan publik (pendidikan) yang tidak lagi berfokus pada sekedar input (terutama anggaran) ataupun output, tetapi lebih berorientasi pada hasil (kinerja). Dengan demikian, keberhasilan pendidikan bukan lagi diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dikucurkan (dimensi input) dan berapa banyak sekolah yang telah didirikan (dimensi output), tetapi diukur dari dimensi kinerjanya yakni seberapa besar hasil dari layanan pendidikan tersebut dapat terserap ke pasar kerja dengan tingkat pendidikan yang telah dicapainya.

Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menekankan bahwa semua warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan; pemerintah wajib untuk membiayai pendidikan dasar tanpa biaya; dan pemerintah diberi mandat untuk mengalokasikan

anggaran minimal 20 persen dari pengeluarannya untuk pendidikan.

Pembangunan ekonomi sektor pendidikan dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas tenaga kerja serta meningkatkan kewirausahaan dan kemajuan teknologi. Bahkan, sektor pendidikan memainkan peran yang penting dalam menyelamatkan kemajuan sosial dan ekonomi dalam meningkatkan distribusi pendapatan, semakin tinggi tingkat pendidikan akan memberikan produktivitas yang tinggi karena semakin meningkatnya tambahan produk dari setiap tambahan tenaga kerja (*marginal product of labour*) (Oztur, 2001). Pembangunan sektor pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah bangsa, karena perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dapat diukur melalui tingkat kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Demikian juga, pendidikan merupakan salah satu kunci dalam penanggulangan kemiskinan baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang.

Beberapa hasil studi empirik membuktikan bahwa tingkat literasi yang rendah erat kaitannya dengan tingginya tingkat *drop-out* sekolah, tingkat kemiskinan, dan pengangguran yang tinggi. Tingkat literasi yang tinggi hanya didapati pada penduduk dengan angka partisipasi sekolah (APS) yang tinggi. Angka partisipasi sekolah (APS) yang tinggi memungkinkan penduduk untuk lebih berpartisipasi ke dalam pasar kerja yang tinggi pula. Angka partisipasi sekolah (APS) yang tinggi

mampu mendorong produktivitas (*earning power*) tenaga kerja. Bahkan dari hasil studi empiric tersebut menemukan bahwa untuk setiap persen peningkatan rata-rata tahun bersekolah (*average years of schooling*) akan menaikkan output per tenaga kerja sekitar 0,16 persen.

Untuk analisis secara spesifik penulisan studi ini difokuskan pada daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sektor pendidikan merupakan salah satu bidang pembangunan di Sulawesi Selatan yang mencakup segala aspek yang mempunyai kaitan dengan sektor kehidupan sosial ekonomi masyarakat lainnya, antara lain : pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi ketenaga kerjaan yang merupakan kinerja dari pendidikan. Permasalahan mendasar dari kondisi tenaga kerja di Sulawesi Selatan saat ini antara lain adalah (1) masih rendahnya pendayagunaan angkatan kerja yang tersedia sehingga berakibat pada banyaknya pengangguran terbuka, (2) masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang ditandai oleh tingkat pendidikan formal di Sulawesi Selatan oleh tamatan sekolah dasar, termasuk didalamnya mereka yang belum tamat dan yang tidak pernah bersekolah, dan (3) masih rendahnya produktivitas, perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Berdasarkan data hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) selama 5 (lima) tahun terakhir, penduduk usia kerja (PUK) di Sulawesi Selatan tercatat mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat yaitu

dari 5.559.748 orang pada tahun 2008, meningkat pada tahun 2009 menjadi 5.660.624 orang, pada tahun 2010 menurun menjadi 5.567.601 orang, meningkat lagi pada tahun 2011 menjadi 5.616.709 orang dan pada tahun 2012 juga meningkat 5.667.985 orang. Hal ini diduga akibat perubahan faktor – faktor demografis seperti fertilitas, mortalitas dan migrasi yang relatif masih cukup tinggi. Perkembangan angkatan kerja pada periode yang sama juga hampir setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah Angkatan Kerja sebesar 3.447.879 orang dan pada tahun 2009 menjadi 3.536.920 orang, tahun 2010 meningkat lagi menjadi 3.571.317 orang dan tahun 2011 sebesar 3.612.424 orang namun pada tahun 2012 sedikit mengalami penurunan menjadi 3.560.891 orang. Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, angkatan kerja di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan maksimum sekolah dasar dimana pada tahun 2008 sebesar 1.760.898 orang atau 51,07 persen, 1.767.856 orang atau 49,98 persen pada tahun 2009 dan 1.787.625 orang atau 50,06 persen pada tahun 2010, dan 1.757.138 orang atau 48,64 persen pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 sebesar 1.665.050 orang atau 46,76 persen.

Kebijakan politik pemerintah daerah serta pertumbuhan ekonomi yang setiap tahun mengalami peningkatan menjadi salah satu faktor pendukung merealisasikan kenaikan anggaran sektor pendidikan tersebut. Secara riil, proporsi belanja sektor pendidikan

terhadap total belanja daerah di Sulawesi Selatan telah mencapai di atas 20 persen dengan kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, proporsi belanja pendidikan terhadap total belanja daerah sudah mencapai 31 persen, padahal tahun 2005 baru mencapai 21 persen. Belanja sektor pendidikan yang meningkat lebih cepat dibandingkan dengan total belanja daerah menyebabkan proporsi belanja sektor pendidikan terhadap total belanja daerah terus membesar. Pada tahun 2005, total belanja riil sektor pendidikan sebesar Rp. 1,7 triliun dan meningkat menjadi Rp. 5,0 triliun pada tahun 2011. Belanja pendidikan kabupaten/kota berkontribusi besar bagi peningkatan total belanja pendidikan di Sulawesi Selatan. Secara riil, belanja pendidikan kabupaten/kota meningkat rata-rata 34 persen per tahun, sedangkan belanja pendidikan provinsi hanya meningkat 5 persen per tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini akan menggunakan dua metode sekaligus, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Pada tahun pertama akan menggunakan metode kualitatif yang ditunjang dengan data kuantitatif. Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan kebijakan belanja pemerintah sektor pendidikan. Mengapa setiap tahun kebijakan belanja pemerintah sektor pendidikan terus mengalami kenaikan, namun dari sisi dampaknya terhadap sektor indikator sosial ekonomi yakni: pendidikan pada indikator rata-rata lama sekolah

penduduk masih sangat rendah serta kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan masih sangat tinggi.

Bagian Kelima

Pengeluaran Pemerintah

Chomsisengphet and McGee (2007) dalam jurnal *Poverty Rates and Spending on Public Education at the K-12 Level: Is There a Correlation?* Menemukan bahwa : 1) Terdapat hubungan yang negative antara pengeluaran untuk pendidikan dan tingkat kemiskinan; 2) Semakin tinggi belanja untuk pendidikan dapat mengurangi angka putus sekolah usia 7-12 tahun; 3) Angka putus sekolah berpengaruh terhadap naiknya angka pengangguran dan mempengaruhi pendapatan keluarga.

Masood S.A, Nasir et al. (2011) dalam *The Impact of Human Capital on Urban Poverty: The Case of* menemukan bahwa : 1) Tingkat pendidikan (dasar dan menengah) mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Sargodha, 2) Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin berpengaruh terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja masyarakat di Kota Sargodha Pakistan. Focus penelitian ini pada kinerja pendidikan terhadap pengurangan kemiskinan melalui produktivitas tenaga kerja dan hanya fokus pada satu Kota saja menggunakan data primer.

Sulistiowati, et al (2010) dalam *Dampak Pengeluaran Pendidikan terhadap out put sektoral dan*

Distribusi Pendapatan Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah menemukan bahwa peningkatan pengeluaran pendidikan 20% dari belanja daerah dapat meningkatkan output sekaligus menurunkan ketimpangan dsitribusi pendapatan. Menggunakan variabel pengeluaran pendidikan, tenaga kerja dan distribusi pendapatan, serta data yang digunakan adalah data panel pada kabupaten/kota di Jawa Tengah. Model yang digunakan menggunakan model regresi biasa.

Fadiya (2010) dalam *Determinants of Educational Kinerjas in Nigeria (1975-2008)* menemukan bahwa pendapatan perkapita; angka harapan hidup; tingkat pendidikan sekolah dasar dan menengah signifikan mempengaruhi kinerja pendidikan di Nigeria. Hasil lainnya peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mempengaruhi tingkat pendidikan (kinerja pendidikan). Variabel yang diteliti kinerja pendidikan yang diukur dengan proksi tingkat pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi serta variabel pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa:

$$Y = C + I + G + X - M$$

Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut

permintaan agregat. Variable G menyatakan pengeluaran pemerintah (Government expenditures), I = investment dan $X-M$ = adalah net ekspor. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Dengan ini, dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.

Peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian diantaranya melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan, bukan hanya dalam bidang pemerintahan akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Musgrave & Musgrave (1989), Ananda (2002) dan Reksohadiprodjo (2009) dalam Archam (2013) menyebutkan dalam perekonomian modern, ada beberapa peranan pemerintah, yaitu:

1. Peran *Alokatif*, yakni peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
2. Peran *Distributif*, yakni peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.
3. Peran *Stabilitatif*, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium

4. Peran *dinamisatif*, yakni peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah memiliki peran penting baik langsung ataupun tidak langsung dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, atau setidaknya kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan dalam jangka panjang melalui tiga instrument fiskal yaitu: 1) pajak, 2) pengeluaran pemerintah (G), dan 3) keseimbangan anggaran atau permintaan agregat (AD). Ketiga instrumen fiskal tersebut berpengaruh pada tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (*efficiency of resources*), akumulasi factor produksi (*production factor accumulation*) dan perkembangan teknologi (*technology progress*).

Dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran pemerintah dapat memberi stimulasi kepada perekonomian untuk bertumbuh melalui kebijakan fiskal yang ekspansif melalui peningkatan pengeluaran pemerintah (G) atau menurunkan pajak (T) untuk meningkatkan permintaan agregat (AD) di dalam perekonomian menyebabkan pendapatan naik yang akan mengunrangi pengangguran yang ada untuk mencapai tingkat pendapatan kesempatan kerja penuh (*full employment level of income*). Sebaliknya dalam kondisi overhating akibat terlalu tingginya permintaan agregat, kebijakan fiskal dapat berperan melalui kebijakan yang kontraktif melalui penurunan pengeluaran pemerintah

(G) atau peningkatan pendapatan pajak (T) untuk menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber perekonomian.

Pengeluaran pemerintah (*government spending*) yang bersifat ekspansif maupun kontraktif menggambarkan usaha pemerintah untuk menggerakkan perekonomian melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan (*revenue*) dan pengeluaran (*expenditure*) pemerintah. Archam (2013) mengemukakan dalam manajemen ekonomi modern kebijakan fiskal mengandung tiga tujuan utama yaitu: *Pertama*, mempengaruhi alokasi sumber-sumber ekonomi untuk sektor publik dan *opportunity cost* pengalihan sumber-sumber ekonomi dari pengusaha pihak swasta. *Kedua* adalah untuk melakukan proses redistribusi kekayaan dan pendapatan antar golongan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk memperoleh keseimbangan antar individu dalam pendapatan bersih atau kesejahteraan. *Ketiga* adalah untuk menentukan arah pertumbuhan dan kestabilan ekonomi nasional. Oleh karena itu kebijaksanaan fiskal harus mampu merencanakan tindakan-tindakan yang akan melancarkan pemanfaatan secara optimal sumberdaya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber keuangan.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya menyangkut pengeluaran, tetapi juga memikirkan masalah kendala anggaran, yang berarti terkait dengan pembiayaan. Kendala anggaran pemerintah yakni pengeluaran terhadap barang dan jasa harus lebih kecil atau sama dengan kekayaan awal. Jika lebih besar dari itu maka akan menimbulkan resiko defisit anggaran. Hal ini sejalan dengan Romer (1996) bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berkaitan dengan pengalokasian dan pengaturan proporsi pengeluaran, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah membiayai pengeluaran tersebut. Setidaknya ada empat sumber pembiayaan pengeluaran pemerintah yaitu: a) Pajak, b) Pinjaman atau penjualan obligasi, c). Pencetakan uang (*seignorage*) dan d). Penjualan asset pemerintah (*Privatisasi*)

Menurut Todaro (2000) salah satu potensi pendapatan yang tersedia bagi pemerintah untuk membiayai segala usaha pembangunan adalah penggalangan pajak. Peranan pajak dalam kebijakan fiskal begitu besar yang merupakan sumber penerimaan utama atau biasa disebut fungsi *budgetair*. Selain itu pajak juga digunakan sebagai fungsi *regular* (mengatur). Fungsi *budgetair* (penerimaan) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara. Fungsi *regular* (*mengatur*), pajak disamping berfungsi mengisi ke kas negara, juga berfungsi untuk mengatur sebagai usaha pemerintah untuk turut campur dalam segala bidang

guna tercapainya tujuan-tujuan pemerintah. Sekaitan dengan itu, Rosen (2008:335), mengemukakan bahwa pajak (tax) merupakan sumber pembiayaan utama pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengenaan jenis pajak tertentu akan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah mengenakan pajak *lump-sum* kepada masyarakat maka pengaruhnya terhadap investasi dan pertumbuhan bersifat positif, tetapi jika pajak yang dikenakan adalah pajak pendapatan maka akan dapat menurunkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, pembiayaan pengeluaran pemerintah melalui pinjaman atau penjualan obligasi pemerintah akan menambah kekayaan dan pendapatan masyarakat di masa yang akan datang (*long run*), namun masyarakat juga memiliki tanggungjawab dimasa datang berupa pajak obligasi. Pembiayaan melalui utang pada prinsipnya sama dengan membiayai pengeluaran melalui pungutan pajak karena utang "*equivalen*" dengan pajak dimasa yang akan datang.

Lain halnya dengan pembiayaan pengeluaran pemerintah melalui pencetakan uang (*seignorage*) cenderung untuk dihindari, karena adanya *growth money* sebagai dampak dari *seignorage* akan menimbulkan inflasi. Meskipun dipahami bahwa ada banyak sumber potensial terjadinya inflasi, akan tetapi pemahaman inflasi pada horizon jangka panjang umumnya dapat disimpulkan

bahwa *money growth* memainkan peranan penting dalam menentukan inflasi, bukan karena uang mempengaruhi harga secara langsung, melainkan karena secara empiris bervariasi lebih dibanding terminan Romer (2001).

Sedangkan berkaitan dengan privatisasi dilakukan dengan berbagai pertimbangan salah satu diantaranya mengurangi beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber pendanaan pemerintah (divestasi). Akan tetapi sumber pembiayaan pengeluaran pemerintah dari privatisasi relative jarang digunakan, terkecuali terjadi krisis fiscal. Karena itu privatisasi yang dijalankan dibanyak Negara, idealnya untuk tujuan peningkatan efisiensi pengelolaan perusahaan, serta peningkatan profesionalitas.

Pengeluaran pemerintah itu sendiri terdiri dari dua bentuk, yaitu pengeluaran rutin (*current expenditure*) dan pengeluaran untuk belanja barang dan modal (*capital expenditure*). Pengeluaran rutin untuk kegiatan-kegiatan rutin yang permanen dan terus-menerus, tujuannya untuk membiayai operasional kegiatan pemerintah dalam pemberian layanan publik. Pengeluaran rutin pemerintah bersifat memenuhi kebutuhan internal kegiatan pemerintah sehingga berpengaruh negative terhadap pertumbuhan. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat. Todaro (2000) mengemukakan bahwa belanja modal tujuannya untuk membiayai

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik. Pengeluaran untuk “*overhead*” social dan ekonomi akan membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas perekonomian.

Sejalan dengan penjelasan di atas, aliran Keynesian menunjukkan bahwa pembelanjaan pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini mendorong peningkatan permintaan berbagai barang dan jasa yang diproduksi perekonomian secara agregat, sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian. Jadi, pengeluaran pemerintah dipandang sebagai kekuatan eksogenus yang mengubah output agregat. Dengan kata lain, dalam kasus ini pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari pengeluaran pemerintah.

Rosen (2008) melakukan pengukuran mengenai peranan pemerintah melalui pendekatan volume pengeluaran pemerintah dalam bentuk : pembelian barang-barang dan jasa-jasa, transfer pendapatan kepada penduduk, perusahaan dan pemerintah, *interest payment*. Pendekatan ini memberikan gambaran bahwa peranan pengeluaran pemerintah sangat penting terhadap perekonomian untuk penyediaan barang-barang public. Tidak itu saja, pengeluaran pemerintah juga sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Uraian mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi diawali oleh Keynes pada era tahun 1930-an, kemudian berkembang pesat setelah munculnya

model pertumbuhan endogenous. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa kebijakan fiscal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika kebijakan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi kuantitas maupun kualitas persediaan modal, misalnya peningkatan investasi pemerintah dalam bidang infrastruktur, investasi dalam bidang pengembangan sumberdaya manusia dan investasi dalam *Research and Development* (Romer, 2006).

Meskipun dalam kasus tertentu pengeluaran pemerintah untuk penyediaan barang public seringkali menimbulkan perdebatan. Tapi secara umum pengeluaran pemerintah memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana dijelaskan di atas, meskipun fakta menunjukkan bahwa hubungan keduanya tidak ada yang konsisten, bisa positif dan negative. Untuk kasus Indonesia salah satunya dilakukan oleh Sodik (2007) dengan menganalisis hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional dengan menggunakan data panel. Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Hal ini mempertegas bahwa keterlibatan pemerintah dalam alokasi sumberdaya dimaksudkan untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber-sumber ekonomi yang efisien, sebab dalam pengadaan barang publik tidak dapat dicapai melalui mekanisme pasar.

Weber dan Niskanen (dalam Jan-Erik Lane, 2000) dalam Archam (2013) menyatakan fungsi utilities dari pemerintah adalah berkaitan dengan besarnya anggaran, oleh karena itu pemerintah harus memaksimumkan anggaran yang merupakan kebijakan pemerintah.

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang makin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, US dan Jepang pada abad ke-19 (Mangkusubroto, 2000) dalam Archam (2013). Adolf Wagner yang merupakan ekonom Jerman mengemukakan pendapatnya dalam bentuk hukum, akan tetapi dalam pandangannya tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam pengertian pertumbuhan secara relative ataukah secara absolute. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{P_kPP_1}{PPK_1} < \frac{P_kPP_2}{PPK_2} < \dots > \frac{P_kPP_n}{PPK_n}$$

PKPP = Pengeluaran pemerintah perkapita

PPK = Pendapatan perkapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

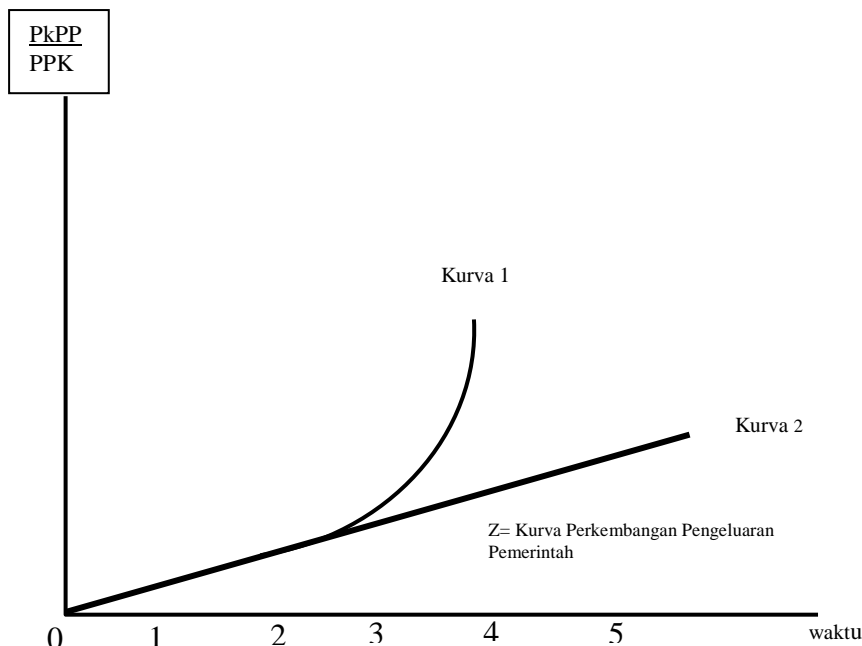
1,2,...,n = Jangka waktu (tahun)

Jika yang dimaksud oleh Wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif, maka hukum Wagner dapat dijelaskan bahwa apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat (Musgrave & Musgrave, 1989). Wagner memberikan tiga alasan

utama untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi : 1) Dengan pertumbuhan industrialisasi ekonomi dan modernisasi akan mengambil tempat yang akan mengurangi peran sektor publik sekaligus pengeluaran pemerintah dimaksudkan untuk mengatur sektor swasta. Misalnya, untuk mengurangi eksploitasi tenaga kerja dari sektor swasta, karena itu membutuhkan pengeluaran tambahan pada penegakan kontrak serta hukum dan order yang akan menyebabkan peningkatan pengeluaran publik; 2) Peningkatan pendapatan riil akan menyebabkan semakin banyaknya permintaan pembangunan infrastruktur dasar khususnya pendidikan dan fasilitas kesehatan, dan Wagner menegaskan bahwa untuk kasus ini adalah pemerintah yang akan menyediakan fasilitas lebih efisien dibandingkan sektor swasta; 3) Menghapus kecenderungan monopoli disuatu negara dan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi di sektor yang mana investasi besar diperlukan seperti kereta api, pemerintah harus tampil kedepan dan berinvestasi di wilayah tersebut yang lagi-lagi akan meningkatkan pengeluaran pemerintah (Bird, 1971, dalam Verma & Arora, 2010).

Hukum Wagner tidak secara eksplisit membuat hipotesis dan hukum yang dibuat tidak disajikan kedalam persamaan matematis. Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam gambar dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eskponensial yang ditunjukkan oleh

kurva 1, dan bukan seperti ditunjukkan oleh kurva 2. Perhatikan Gambar berikut ini :



Gambar 5.1 Hukum Wagner, Sumber: Mangkusubroto, 2000 172

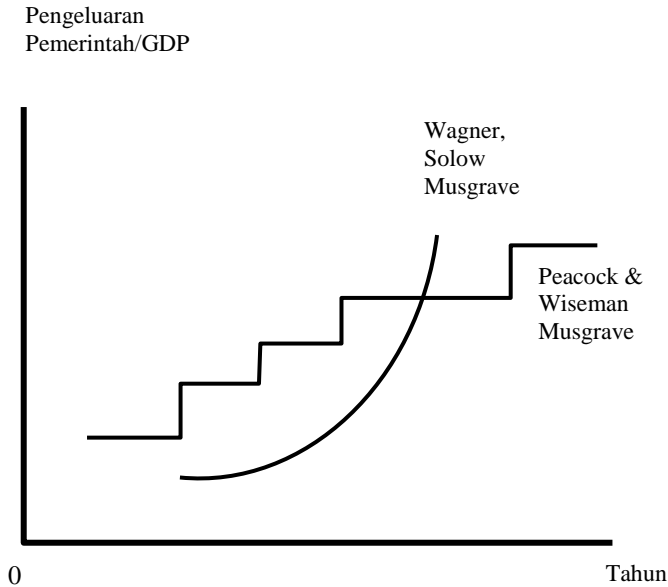
Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik, sekaligus memperjelas hukum Wagner dalam persamaan matematis. Studi Peacock dan Wiseman merupakan analisis “*pola waktu*” pengeluaran publik, yaitu didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sementara

masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Dalam hal ini mereka berdua mendasarkan pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah, sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena (Mangkusubroto, 2000:173).

Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya PDB menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkatkan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tariff pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Perang tidak

hanya dibiayai dengan pajak, akan tetapi pemerintah juga melakukan pinjaman ke Negara lain. Akibatnya setelah perang sebetulnya pemerintah dapat kembali menurunkan tarif pajak, namun tidak dilakukan karena pemerintah masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut (Musgrave & Musgrave, 1989)

Apabila pengeluaran pemerintah meningkat karena PDB yang mulai meningkat, pengembalian pinjaman dan aktivitas baru setelah perang. Ini yang disebut efek inspeksi (*Inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah dimana kegiatan ekonomi tersebut semula dilaksanakan untuk swasta. Ini disebut efek konsentrasi (*Concentration effect*). Adanya ketiga efek tersebut menyebabkan aktivitas pemerintah bertambah. Setelah perang selesai dan keadaan kembali normal maka tingkat pajak akan turun kembali. Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi seperti tangga (Mangkusubroto, 2000: 17) dalam Archam (2012), seperti gambar berikut:



Gambar 5.2 Pengeluaran Pemerintah, Sumber : Mangkusubroto, 2000

Dalam teorinya, Collin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi penawaran agregate. Di lain pihak, pengeluaran

pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat. Inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara permintaan agregate dan penawaran agregate. Apabila batas 25 persen terlampaui maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi social ekonomi masyarakat.

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penentuan Permintaan

$$U_i = f(G, X)$$

G = vektor dari barang publik

X = vektor barang swasta

i = individu; = 1, ..., m

U = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif

akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (budget constraints). Misalkan seorang individu

(i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak G_k . Untuk menghasilkan i barang K

sebanyak G_k , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

Penentuan tingkat output

$$U_p = g(X, G, S)$$

U_p = fungsi utilitas

S = keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi atau kedudukan

G = vector barang public

X = vector barang swasta

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih :

$$\text{Max } U_i = f(X, G)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya :

$$P_x X + t B < M_i$$

P = vektor harga barang swasta

X = vektor barang swasta

B_i = basis pajak individu 1

M_i = total pendapatan individu 1

T = tarif pajak

Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses, yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (*Price Taker*). Atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang public, sehingga bertindak sebagai pengambil output (*Output Taker*).

Bagian Keenam

Teori Kemiskinan (*Poverty*)

Konsep tentang kemiskinan telah mengalami perluasan seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi dianggap sebagai dimensi ekonomi saja melainkan telah meluas pada dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Sedangkan definisi menurut UNDP kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan.

Menurut Bappenas (2012), kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Senada dengan hal tersebut Parwoto (2001)

mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai satu taraf yang dianggap manusiawi.

Lebih jauh lagi, kemiskinan dipandang tidak hanya menyangkut standar pendapatan atau konsumsi yang rendah melainkan juga rendahnya juga kebebasan berpolitik dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hal tersebut berkaitan pula dengan keterbatasan fasilitas umum, pilihan, kesempatan serta partisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi (Sen, 1999). Bahkan lebih mendalam lagi, Gandhi (2005) menggambarkan kemiskinan dalam 4 (empat) kata yang singkat "4L" yakni mereka yang berada pada situasi *The Last, The Least, The Lowest, dan The Lost*. Secara tegas dikatakan bahwa orang-orang miskin adalah mereka yang tercecar di belakang, hina dan rendah dalam segala hal seperti hidup tanpa arah.

Senada dengan itu hal tersebut lebih jauh Alhumami (2009) mengenalkan makna kemiskinan secara lebih luas yakni ketidakmampuan manusia, yang ditandai pendidikan yang rendah, tidak berpengetahuan, takberketerampilan, takberdayaan. Dalam situasi demikian, masyarakat ada dalam posisi tidak setara untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber ekonomi produktif hingga terhalang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi hak mereka.

Masyarakat miskin hidup dalam suatu lingkaran setan kemiskinan yang tak berujung. Lingkaran setan berputar dari kemiskinan, pendapatan rendah, produktivitas rendah, produksi rendah dan bertambah miskin. Karena bertambah miskin, maka konsumsi makan rendah, terjadi kekurangan gizi, daya tahan tubuh menurun, frekuensi dan durasi sakit meningkat, kapasitas terbatas, produksi rendah pendapatan rendah untuk akhirnya semakin bertambah miskin. Dalam perspektif ketahanan pangan, masyarakat yang menghabiskan lebih dari 70 persen pengeluarannya hanya untuk makanan disebut sebagai kategori orang miskin (Bappenas, 2012).

Lingkaran setan kemiskinan merupakan teori yang dipopulerkan oleh Nurkse tentang perangkap lingkaran kemiskinan (*The vicious circle of poverty*). Dalam teori tersebut dikatakan bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu tetapi juga menghadirkan hambatan kepada pembangunan dimasa yang akan datang. Lebih jauh dikatakan dalam teori tersebut bahwa lingkaran perangkap kemiskinan yang menghalangi suatu negara mencapai tingkat pembangunan yang pesat adalah dari segi permintaan dan penawaran modal.

Disamping hal tersebut dalam kemiskinan juga dikenal adanya teori sebab akibat secara kumulatif (*Sircular Cumulative Causation Theory*) oleh Gunnar Myrdal. Teori ini menjelaskan bahwa adanya keadaan yang semakin memburuk bagi daerah yang tidak maju

atau miskin jika dilakukan pembangunan ekonomi di suatu negara. Menurut Myrdal dalam teori ini, jika dilakukan pembangunan ekonomi suatu negara, akan muncul dua faktor yakni: memperburuk keadaan-keadaan ekonomi bagi daerah miskin (*backwash effects*) dan yang kedua adalah faktor yang dapat mendorong daerah miskin menjadi lebih maju atau yang disebut (*spread effects/trickle down effects*). Terjadinya *backwash effects* disebabkan oleh faktor-faktor:

1. Terjadinya pemusatan atau penarikan tenaga kerja, terutama yang memiliki keahlian dan tingkat produktif tinggi dari daerah yang tidak maju ke daerah yang sangat maju.
2. Terjadinya penarikan pemusatan faktor produksi modal dari yang tidak mau ke daerah yang maju.
3. Terjadinya pola pemusatan perdagangan yang lebih lengkap dari daerah yang maju ke daerah yang tidak maju.
4. Keadaan jaringan pengangkutan atau sarana dan prasarana transportasi lebih lengkap dan cepat di daerah yang sangat maju dibandingkan daerah yang tidak maju.

Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau kekeluarga.

Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (*social distinction*) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk (Todaro, 2009).

Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (*poverty line*) yang sifatnya tetap tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu masyarakat. Garis Kemiskinan (*poverty line*) adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada defenisi mengenai standar hidup minimum. Sehingga kemiskinan abosolut ini bisa diartikan dari melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin.

World Bank (2009) menghitung tingkat dan jumlah penduduk miskin absolut dengan menggunakan ukuran tunggal yang seragam untuk semua negara. Di negara-

negara sedang berkembang seseorang disebut miskin bila berpendapatan kurang dari \$ US 1 per hari, dimana diperkirakan ada sekitar 1,2 milyar penduduk dunia yang hidup dibawah ukuran tersebut. Sementara garis kemiskinan yang diukur berdasarkan ukuran \$ US 2 juga telah dipublikasikan dimana lebih dari 2 milyar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. US dolar yang digunakan adalah US \$ PPP (*Purchasing Power Parity*) bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

Garis kemiskinan di Indonesia secara luas digunakan pertama kali dikenalkan oleh *Sajogyo* pada tahun 1964 yang diukur berdasarkan konsumsi setara beras per tahun. Menurut *Sajogyo* terdapat tiga ukuran garis kemiskinan yaitu miskin, sangat miskin dan melarat yang diukur berdasarkan konsumsi per kapita per tahun setara beras sebanyak 480 kg, 360 kg dan 270 kg untuk daerah perkotaan dan 320 kg, 240 kg dan 180 kg untuk daerah pedesaan (Arndt, 1987).

BPS menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin (*head count index*) yaitu penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan berdasarkan data hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Garis kemiskinan yang merupakan dasar penghitungan jumlah penduduk miskin dihitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yaitu besarnya rupiah yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan

atau lebih dikenal dengan garis kemiskinan makanan dan non makanan.

Garis kemiskinan makanan yang dimaksud adalah pengeluaran konsumsi per kapita per bulan yang setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang atau jasa lainnya. Komponen garis kemiskinan makanan adalah nilai rupiah yang dikeluarkan untuk memenuhi 52 komoditi makanan terpilih hasil Susenas modul konsumsi. Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah nilai rupiah dari 27 sub kelompok pengeluaran yang terdiri atas 51 jenis komoditi dasar non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Kemiskinan relatif pada dasarnya menunjuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Mereka yang berada dilapis terbawah dalam persentil derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Dalam kategori seperti ini, dapat saja mereka yang digolongkan sebagai miskin sebenarnya sudah dapat mencukupi hak dasarnya, namun tingkat keterpenuhannya berada dilapisan terbawah.

Kemiskinan relatif memahami kemiskinan dari dimensi ketimpangan antar kelompok penduduk. Pendekatan ketimpangan tidak berfokus pada pengukuran garis kemiskinan, tetapi pada besarnya

perbedaan antara 20 atau 10 persen masyarakat paling bawah dengan 80 atau 90 persen masyarakat lainnya. Kajian yang berorientasi pada pendekatan ketimpangan tertuju pada upaya memperkecil perbedaan antara mereka yang berada dibawah (miskin) dan mereka yang makmur dalam setiap dimensi statifikasi dan diferensiasi sosial. Ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang berbeda dengan kemiskinan.

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

World Bank mengelompokkan penduduk kedalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang.
3. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Menurut Todaro (2009) menyatakan bahwa variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan.
2. Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan.
3. Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya.
4. Perbedaan peranan sektor swasta dan negara.
5. Perbedaan struktur industri.
6. Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain.

7. Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Sedangkan menurut Jhingan (2000), mengemukakan tiga ciri utama negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan, *pertama*, prasarana dan sara pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan ataupun keahlian. Ciri *kedua*, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebahagian kecil penduduk yang bisa mejadi tenaga kerja produktif dan *ketiga* adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman.

Sedangkan faktor-faktor lainnya yang menyebabkan kemiskinan menurut Sharp dalam Kuncoro (2010) adalah:

1. Secara mikro kemiskinan minimal karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kaulitasnya rendah
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber

daya manusia ini akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.

3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Lebih lanjut Kuncoro (2010) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan sebuah konsep abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda dimana tergantung dari pengalaman dan perspektif analis. Cara pandang analis akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana kemiskinan itu terjadi (sebab-sebab kemiskinan) dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Oleh karena itu, agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menjelaskan pengertian dan penyebab kemiskinan secara lengkap.

Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang masuk kedalam kategori miskin. Namun, menurut *World Bank* (2001) setidaknya ada tiga faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:

1. Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti: makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan.
2. Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan didepan institusi negara dan masyarakat.

3. Rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan menanggulangnya.

Bank Dunia (*World Bank*) memiliki indikator-indikator kemiskinan yang terdiri dari:

1. Kepemilikan tanah dan modal yang terbatas
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
3. Pembangunan yang bias di kota
4. Perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat
5. Perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi
6. Rendahnya produktivitas
7. Budaya hidup yang jelek
8. Tata pemerintahan yang buruk
9. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan

World Bank (2001) menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki banyak pengertian dimana menyimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi dimana orang ingin lepas darinya. Lebih jauh dijelaskan bahwa kemiskinan adalah keadaan kelaparan, kurang tempat tinggal, kurang sandang dan kurang pendidikan. Menurut defenisi ini, orang menjadi miskin bukan karena kelemahan mereka, namun karena hal itu terjadi diluar kendali mereka. Biasanya, karena kebijakan yang buruk dari institusi negara atau masyarakat yang tidak memperhatikan suara mereka.

Kemiskinan juga didefinisikan masyarakat a yang hidup dalam keluarga yang kemampuan konsumsinya dibawah garis tertentu, seperti dibawah \$1 atau \$2 per hari atau dibawah level yang ditetapkan negara masing-masing. Sementara itu terdapat juga banyak faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat kemiskinan, mulai dari produktivitas tenaga kerja, tingkat upah netto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta sumber daya alam, ketersediaan fasilitas umum (seperti pendidikan dasar, kesehatan, informasi, transportasi, listrik, air bersih dan lokasi pemukiman), penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam suatu wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja budaya atau tradisi, politik, bencana alam dan peperangan. Sebagian besar dari faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain (Tambunan, 2001).

Sedangkan menurut Jhinghan (2000) terdapat tiga ciri utama pada negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat dari terjadinya kemiskinan. Ciri pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki ketrampilan atau keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi menjadi

terhambat. Ciri ketiga adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman. Hal ini terjadi karena penduduk tidak memiliki pilihan lain. Kepemilikan tanah rata-rata per petani cukup sempit dan sebagai akibatnya mereka terpaksa hidup pada tingkat yang hanya cukup untuk sekedar hidup.

Menurut Kartasasmita (1996) serta Hendra (2010) menjelaskan penyebab terjadinya kemiskinan dimana akibat dari berbagai faktor yang terdiri dari: *pertama*, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan pengembangan diri yang terbatas. *Kedua*, rendahnya tingkat kesehatan dimana tingkat kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan daya tahan fisik, daya pikir serta prakarsa menjadi rendah pula. Dengan demikian produktivitas yang dihasilkan menjadi berkurang, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Akibat dari hal ini adalah *bargaining position* mereka dalam hampir seluruh kegiatan ekonomi menjadi lemah. *Ketiga*, terbatasnya lapangan kerja. Selama lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha masih ada, harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan masih dapat dilakukan. *Keempat*, kondisi keterisolasian. Dalam kondisi terpencil atau terisolasi penduduk akan kurang mampu menjalankan roda perekonomiannya.

Sedangkan menurut Sharp (1996) dikutip dalam Hendra (2010) dari sudut pandang ekonomi terdapat tiga penyebab kemiskinan, antara lain:

1. Kemiskinan yang muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah
2. Kemiskinan yang muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya mendapatkan upah yang rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.
3. Kemiskinan yang muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber

daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (Bappenas 2004).

Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin, Bappenas menggunakan pendekatan utama antara lain:

1. Pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan kebutuhan dasar ini melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum yang terdiri dari pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan penyediaan air bersih dan sanitasi.
2. Pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan ini menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan aset dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat.
3. Pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*), pendekatan ini menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat.

4. Pendekatan objektif dan subjektif, pendekatan objektif atau sering disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan.

Dari pendekatan-pendekatan tersebut, Bappenas (2004) menguraikan indikator-indikator penyebab kemiskinan seperti berikut:

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, kurangnya layanan kesehatan reproduksi, jarak fasilitas kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal.
3. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung.

4. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.
5. Terbatasnya akses layanan kesehatan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak
6. Terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air.
7. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian.
8. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam.

9. Lemahnya jaminan rasa aman. Hal ini terkait dengan permasalahan yang terjadi di daerah konflik.
10. Lemahnya partisipasi. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang melibatkan mereka.
11. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi.

Sedangkan menurut *SMERU* (2001) kemiskinan memiliki beberapa dimensi antara lain:

1. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (kerena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.

6. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Bagian Ketujuh

Outcome Pendidikan Dalam Teori Human Capital

Human Capital awal kemunculannya dapat ditelusuri dalam teori ekonomi klasik pada tahun 1776, kemudian dikembangkan menjadi teori ilmiah (Fitzsimons, 1999). *Human Capital* semakin populer pada tahun 1960 dan 1970-an, ketika Schultz (1960) dan Becker (1975) memberikan sudut pandang yang berbeda tentang konsep dan formasi *Human Capital*. Meskipun akumulasi *Human Capital* merupakan hal penting dalam teori pertumbuhan endogen sebagaimana yang dikemukakan oleh Lucas (1988) dan Romer (1989, 1990). Namun Mankiw dan kawan-kawan yang pertama kali menggunakan *Human Capital* dalam fungsi produksi.

Setelah *Human Capital* menjadi kajian akademik, Schultz (1961) memperkenalkan *Human Capital* sebagai salah satu faktor penting pertumbuhan ekonomi. Oleh karena eksistensi dan perkembangan *Human Capital* sebagai kajian akademik maka beberapa peneliti memperluas bidang kajian *Human Capital* untuk memperjelas bagaimana *Human Capital* dapat

berkontribusi pada pembangunan sosial politik dan kebebasan (Sen, 1999).

Human Capital dapat dikategorikan dalam berbagai perspektif berdasarkan bidang kajian. *Pertama*, *Human Capital* berdasarkan sudut pandang individu. Schultz (1961) memperkenalkan *Human Capital* sebagai “*something akin property*”, *Human Capital* sama halnya dengan hak milik. Suatu pandangan yang bertentangan dengan konsep tenaga kerja dalam perspektif klasik yang memandang *Human Capital* sebatas produktifitas kolektif tenaga kerja yang dapat menghasilkan kesejahteraan bersama. Banyak peneliti yang sepakat dengan pandangan Schultz yang menyatakan bahwa pendidikan dan keterampilan melekat pada individu. Beberapa peneliti lainnya memperluas cakupan *Human Capital* yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, pendidikan dan kemampuan teknis lainnya. Sedangkan Rastogi mengkonseptualisasikan *Human Capital* sebagai pengetahuan, kompetensi, sikap dan kebiasaan pada setiap individu.

Selain secara individu, Pandangan *kedua* berdasarkan proses akumulasinya. Perspektif ini menekankan pada proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan umum dan kejuruan (Dae-Bong. 2009). Meskipun hal ini merupakan perluasan dari konsep *Human Capital* namun perspektif ini menolak bahwa manusia akan belajar pengetahuan dan keterampilan melalui pengalamannya.

Konsep *Human Capital* ketiga didasarkan pada orientasi produktifitas. Romer (1990) menyatakan bahwa *Human Capital* sebagai sumber fundamental produktifitas ekonomi. Hal ini berarti bahwa *Human Capital* sebagai suatu investasi yang dapat meningkatkan produktifitasnya. Bahkan akhir-akhir ini Frank & Bemanke (2007) mendefinisikan bahwa *Human Capital* sebagai kombinasi dari berbagai faktor yaitu pendidikan, pengalaman, pelatihan, kecerdasan, kebiasaan kerja, integritas, dan inisiatif yang dapat berdampak pada produktifitas marjinal tenaga kerja. Berdasarkan perspektif *Human Capital* yang berorientasi produksi, *Human Capital* merupakan '*Stock of Skill and Knowledge*' yang berperan dalam peningkatan produktifitas tenaga kerja untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi. Walaupun berbagai pandangan dan pengembangan konsep *Human Capital* tidak ada yang menafikan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah bagian penting dalam *Human Capital*.

Secara organisasional, Ancok (2002) menyatakan bahwa modal manusia adalah komponen yang sangat penting di dalam organisasi. Manusia dengan segala kemampuannya jika dikerahkan secara baik akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ada enam komponen dari modal manusia, yakni: (1) Modal intelektual; (2) Modal emosional; (3) Modal sosial; (4) Modal ketabahan, (5) Modal moral; dan (6) Modal kesehatan. Keenam komponen modal manusia ini akan

muncul dalam sebuah kinerja yang optimum apabila disertai oleh modal kepemimpinan dan modal struktur organisasi yang memberikan wahana kerja yang mendukung.

Lebih jauh Mark L. Leegnck Hall (Ancok: 2002) menjelaskannya dengan mengutip beberapa pengertian *Human Capital* sebagai berikut :

- a) *Human Capital is "all individual capabilities, the knowledge, skill, and experience of the company's employees and manager" (Edvinson & Malone, 1997).*
- b) *Human Capital is "the collective value of an organization's know-how. Human Capital refer to the value, susually not reflected in accounting system, which result from the investment an organization must make to recreate the knowledge in its employees (Cortade & Woods, 1999).*
- c) *Human Capital is "the knowledge, skill, and capabilities of individual that have economic value to an organization (Bohlander, Snell, & Sherman, 2001).*

Berdasarkan tiga pengertian di atas dapat dipahami adanya kesamaan esensi yang menunjukkan bahwa modal manusia melekat dalam diri individu dan ekonomi menjadi dimensi kebermanfaatannya.

Teori *Human Capital* menjadi dasar studi tenaga kerja, didasarkan pada premis bahwa produktifitas dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas tenaga kerja

dimana tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, kesehatan merupakan indikator dari produktivitas (Becker, 1975; Schultz, 1961). Namun pendidikan adalah unsur yang paling penting dalam *Human Capital* (Schultz, 1961).

Schultz, 1960 dan Denison, 1962 (Tjiptoherijanto, 1994) menunjukkan sekitar 20 % pertumbuhan ekonomi AS untuk beberapa dasawarsa disebabkan oleh perbaikan tingkat pendidikan dan kesehatan. Pengaruh perbaikan kesehatan meningkatkan partisipasi tenaga kerja selanjutnya memperbaiki tingkat pendidikan dan kemudian menyumbang pertumbuhan ekonomi. Tingkat kesehatan yang cukup baik akan merangsang keinginan meningkatkan produktivitas dan mengubah sikap ke arah aktivitas yang lebih bersifat kewiraswastaan atau bersikap lebih produktif.

Lebih jauh Schultz (1960) menyatakan ada tiga macam investasi dalam sumber daya manusia yaitu migrasi, pendidikan dan kesehatan. Becker (1975), menyatakan bahwa pendidikan, pelatihan, dan kesehatan merupakan bagian terpenting dalam investasi modal manusia.

Dalam pembangunan, *Human Capital* telah menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di beberapa Negara karena beberapa alasan, *pertama*, investasi *Human Capital* meningkatkan produktifitas tenaga kerja yang mendorong output dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, peningkatan produktifitas tenaga kerja

juga meningkatkan produktifitas faktor-faktor produksi yang lain. Hal ini mengacu pada dampak internal dan eksternal *Human Capital* (Lucas 1988).

Pertumbuhan ekonomi dan *Human Capital* hubungan dua arah. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi terhadap *Human Capital* yaitu pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi pembangunan manusia khususnya melalui aktifitas masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dapat membelanjakan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, air bersih, pendidikan dan kesehatan. Disamping itu, kaum perempuan mempunyai kontribusi yang besar dalam meningkatkan sumber daya manusia, pendidikan yang lebih tinggi untuk perempuan, akan berdampak positif dalam pembangunan manusia termasuk investasi pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kita dapat melihat bahwa pembangunan manusia bukan hanya ditentukan oleh tingkat pendapatan tetapi juga oleh peran pemerintah (Ramirez, A. G. Ranis and F. Stewart, 1998).

Pendidikan jelas mempunyai pengaruh yang signifikan pada modal manusia (*Human Capital*), kualitas penyelenggaraan pendidikan akan menentukan kualitas sumberdaya manusia dan kualitas sumber daya manusia yang bagus merupakan *Human Capital* yang sangat penting dalam menunjang kehidupan ekonomi. Untuk itu guna lebih memahami hubungan antara pendidikan dan modal manusia, maka diperlukan pemahaman dua

konsep tersebut, sehingga dapat tergambar jelas bagaimana kaitannya.

Bahkan Menurut Harbison & Meyers (1964) dikutip dalam Jhingan (2012:419) mengemukakan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah proses peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh rakyat suatu Negara.

Menurut undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.. Dari pengertian tersebut dapatlah dimengerti bahwa pendidikan merupakan suatu usaha atau aktivitas untuk membentuk manusia-manusia yang cerdas dalam berbagai aspeknya baik intelektual, sosial, emosional maupun spiritual, trampil serta berkepribadian dan dapat berperilaku dengan dihiasi akhlak mulia. Ini berarti bahwa dengan pendidikan diharapkan dapat terwujud suatu kualitas manusia yang baik dan mampu mengisi kehidupannya secara produktif bagi kepentingan dirinya dan masyarakat.

Sementara itu *Human Capital* menurut para ahli dapat diberi pengertian. Menurut Hall (2003:45-46) yang mengutip beberapa pengertian, *Human Capital* diartikan sbb:

- a. *Human Capital is “the knowledge, skills, and capabilities of individual that have economic value to an organization (Bohlander, Snell, & Sherman, 2001)*
- b. *Human Capital is “the collective value of an organization’s know-how. Human Capital refers to the value, usually not reflected in accounting system, which results from the investment an organization must make to recreate the knowledge in its employees (Cortada & Woods, 1999)*
- c. *Human Capital is “all individual capabilities, the knowledge, skills, and experience of the company’s employees and managers” (Edvinsson & Malone, 1997)*

Dari tiga pengertian di atas nampak sekali adanya kesamaan esensi yang menunjukkan bahwa modal manusia itu merupakan sesuatu yang melekat dalam diri individu, dan hal inipun tidak berbeda dengan pengertian yang dikemukakan oleh Jac Fitz-entz. Disamping itu hal yang cukup menonjol dari definisi di atas adalah dimensi ekonomi yang menjadi acuan kebermanfaatannya.

Dengan memahami dua konsep tersebut yaitu pendidikan dan *Human Capital* dapatlah difahami bahwa kemampuan-kemampuan yang ada pada manusia (*Human Capital*) pada dasarnya adalah merupakan hasil dari suatu proses pendidikan, pendidikan merupakan upaya untuk membentuk *Human Capital* yang berkualitas.

Perhatian para ahli ekonomi pembangunan kepada *Human Capital* yang dalam hal ini direpresentasikan dengan pendidikan, telah memunculkan model modal manusia (*Human Capital model*) Dalam model Solow (Romer 1986) dalam Fattah (2005) yang mengasumsikan bahwa produksi bersifat *constant return to scale*. Dengan asumsi tersebut, maka output adalah given sehingga *Human Capital Model* dengan pendekatan fungsi produksi Cobb Douglas adalah :

$$Y(t) = K(t)^\alpha H(t)^\beta [A(t)L(t)]^{1-\alpha-\beta}$$

Dimana $\alpha, \beta > 0$, dimana H= stock *Human Capital* L= Labour, sehingga pertumbuhan K dan L adalah :

$$\dot{K}(t) = S_k Y(t)$$

Dimana S_k = bagian output untuk akumulasi modal fisik dan depresiasi = 0

$$\dot{L}(t) = n \cdot L(t)$$

Selanjutnya seperti dalam model Solow, kemajuan teknologi diasumsikan konstan dan eksogen, sehingga:

$$\dot{A}(t) = g \cdot A(t)$$

Akhirnya akumulasi *Human Capital* sebagai akumulasi capital secara fisik adalah

$$\dot{H}(t) = s_H \cdot Y(t)$$

Dimana S_H adalah resources yang disediakan untuk akumulasi modal manusia (*Human Capital Accumulation*).

Dengan demikian akumulasi teknologi yang diperlukan untuk menghasilkan *Human Capital* yang baru mengkombinasikan modal fisik, *Human Capital* itu sendiri dan tenaga kerja. Hal ini sama dengan teknologi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang. Oleh karena itu s_H merupakan bagian dari output.

Bagian Kedelapan

Kemiskinan dan Pendidikan

Kemiskinan tidak hanya membicarakan dimensi ekonomi saja, melainkan multi dimensi yang menyangkut keterbatasan seseorang dalam segala bidang. Termasuk keterbatasan akses terhadap sumber-sumber kehidupan seperti akses air bersih, akses terhadap sumber daya alam, akses terhadap partisipasi politik, ataupun akses terhadap faktor-faktor produksi fisik dan non fisik (pendidikan dan kesehatan). Kekurangan dalam pendapatan membuat seseorang lebih berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan pokok. Mereka kurang memberi perhatian pada gizi, pendidikan, ataupun perawatan kesehatan. Padahal elemen-elemen ini merupakan aset yang cukup penting dalam matapencarian seseorang. Seseorang dengan tingkat pendidikan rendah kurang terakomodasi dalam pasar kerja yang memberi jaminan upah layak. Pendapatan yang rendah membuat penduduk miskin kurang memperhatikan atau tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan dengan baik, sehingga produktivitaspun rendah, dan oleh karena itu pendapatan yang diperolehpun rendah. Situasi ini berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya, membentuk sebuah

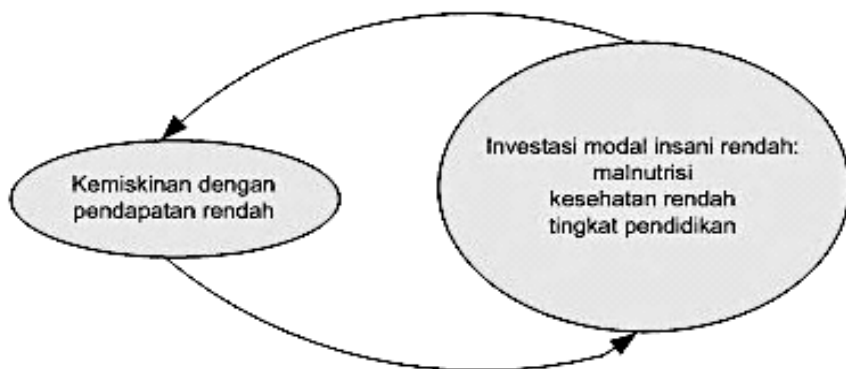
perangkap kemiskinan.

Pendapatan seseorang diperoleh dari kegiatan/pekerjaan yang dilakukannya. Mengikuti DFID-World Bank, aset-aset yang dibutuhkan untuk memperoleh upah/pendapatan diidentifikasi menjadi:

1. *Human capital* (pendidikan, keahlian dan kesehatan)
2. *Natural capital* (tanah, air, laut, hutan, dan sumber daya lain)
3. *Financial capital* (tabungan, sumber-sumber kredit)
4. *Physical capital* (infrastruktur; listrik, transportasi, energi, peralatan ataupun mesin-mesin)
5. *Social capital* (budaya, jaringan, hubungan kepercayaan, lembaga-lembaga masyarakat, akses terhadap lembaga-lembaga sosial)

Mudah dimengerti jika seseorang yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah sulit untuk memperoleh upah/pendapatan yang layak. Selanjutnya dengan rendahnya pendapatan, mereka akan kesulitan untuk mengakses pendidikan tinggi yang relatif membutuhkan biaya lebih mahal. Seperti digambarkan oleh Todaro (2000), di kebanyakan negara-negara berkembang biaya-biaya pendidikan per murid di jenjang yang lebih tinggi jauh melampaui biaya pendidikan di tingkat dasar. Selain hambatan finansial, penduduk miskin juga terhambat pada standard kualifikasi yang

dimiliki. Hal ini disebabkan karena kemiskinan telah memaksa mereka untuk bekerja lebih keras, dan mengabaikan kualitas nutrisi dan kesehatan keluarga mereka sehingga kemampuan anak-anak keluarga miskin dalam menyerap pelajaran relatif rendah. Keterkaitan antara pendidikan (sebagai bagian dari modal insani) dengan kemiskinan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 8.1 Mata Rantai Pendidikan dan Kemiskinan,
Sumber: Mughal, Waris Hameed, 2007

Gambar di atas menunjukkan bahwa kemiskinan (yang disertai dengan rendahnya pendapatan) menyebabkan rendahnya investasi modal insani. Rendahnya modal insani ini mengakibatkan terjadinya '*malnutrisi*' (kurang gizi), tingkat kesehatan dan pendidikan rendah. Faktor-faktor ini menghambat kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan

upah/pendapatan layak. Sebaliknya yang terjadi pada mereka yang beruntung perekonomiannya, mereka dapat mengkonsumsi nutrisi bergizi, memelihara kesehatan, memfasilitasi anak-anak mereka dengan buku-buku, uang saku, les, maupun peralatan-peralatan yang dapat menunjang pembelajaran mereka sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai pendidikan tinggi dan kesempatan kerja yang lebih baik. Jadi pola distribusi pendapatan yang timpang akan berimbas pula pada pola distribusi investasi *human capital*, sehingga tanpa intervensi kebijakan dari pemerintah, maka sistem akan melestarikan ketimpangan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Robert J. Barro dengan menggunakan data-data dari 100 negara selama 1965-1995 telah membuktikan adanya keterkaitan antara *human capital* dengan pertumbuhan ekonomi (Barro, 2001). Sedang menurut Romer (1996), *human capital* berpengaruh pada munculnya gagasan-gagasan dan teknologi-teknologi baru, yang mana selanjutnya mempengaruhi kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Investasi modal insani merupakan investasi nonmaterial yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Rendahnya *human capital* di negara berkembang dapat dianggap sebagai penyebab langgengnya kemiskinan di Negara tersebut.

Apabila dilihat dari aspek makro, pendidikan berpengaruh pada tingkat kesehatan, tingkat fertilitas

(rendah), mortalitas (rendah) yang kesemuanya itu membawa dampak pada laju pertumbuhan penduduk yang rendah dan tingkat kesehatan yang lebih baik pada angkatan kerja. Bersama-sama dengan peningkatan produktivitas individual maupun masyarakat, dan meningkatnya tingkat partisipasi kerja penduduk, maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan kesehatan, sebagai bagian dari *human capital* dapat mengubah cara berpikir seseorang menjadi lebih imajinatif, kreatif, dan sistematis, serta lebih cepat dalam menyerap informasi dan menggunakannya sehingga aktivitas yang dikerjakan bisa dilakukan dengan efisien.

Dari beberapa konsep dan teori tentang kemiskinan (*poverty*) yang dikemukakan di atas, maka konsep kemiskinan yang dimaksudkan dalam penelitian ini mengacu pada konsep sebagai berikut :

1. Kemiskinan yang muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, nasib yang kurang beruntung dan adanya diskriminasi.
2. Konsep kemiskinan secara lebih luas yakni ketidakmampuan manusia, yang ditandai pendidikan yang rendah, tidak berpengetahuan, takberketerampilan, takberdayaan. Dalam

situasi demikian, masyarakat ada dalam posisi tidak setara untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber ekonomi produktif hingga terhalang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi hak mereka.

3. Salah satu dari tiga ciri utama negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan, adalah sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan ataupun keahlian.
4. Tingkat pendidikan yang rendah akan berdampak terhadap sulitnya untuk memperoleh upah/pendapatan yang layak. Selanjutnya dengan rendahnya pendapatan akan berdampak terhadap sulitnya mengakses jenjang pendidikan yang lebih tinggi akibat biaya lebih mahal. Secara umum salah satu kendala bagi negara-negara berkembang adalah biaya pendidikan di jenjang yang lebih tinggi jauh melampaui biaya pendidikan di tingkat dasar. Selain hambatan finansial, penduduk miskin juga terhambat pada standard kualifikasi yang dimiliki. Hal ini disebabkan karena kemiskinan telah memaksa untuk bekerja lebih keras, dan mengabaikan kualitas

nutrisi dan kesehatan keluarga mereka sehingga kemampuan anak-anak keluarga miskin dalam menyerap pelajaran relatif rendah.

Bagian Kesembilan

Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Daerah

Distribusi pendapatan (*Income Distribution*) merupakan salah satu indikator penting perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ekonomi daerah yang baik tidak hanya ditandai oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, tetapi juga adanya pemerataan distribusi pendapatan yang lebih baik. Distribusi pendapatan yang relatif baik ditandai oleh kondisi dimana perbedaan antara golongan masyarakat kaya dan miskin yang tidak terlalu menyolok dalam perekonomian daerah bersangkutan (Syafriзал, 2014).

Pembangunan ekonomi pada esensinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai kondisi itu maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang didahului dengan perencanaan. Todaro (2000) mendefinisikan perencanaan ekonomi sebagai upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan keputusan keputusan ekonomi jangka panjang, serta mempengaruhi, mengarahkan dan dalam kasus tertentu juga mengendalikan tingkat pertumbuhan variabel ekonomi, seperti pendapatan,

konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, ekspor-impor dan sebagainya. Uraian selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan adalah untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, pada saat yang bersamaan harus pula mengurangi angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran.

Archam (2012) menyatakan bahwa dalam proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya tujuan utama akan tetapi juga perlu mempertimbangkan persoalan distribusi pendapatan, sebab negara yang semata-mata hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, tanpa memikirkan pendistribusian pendapatan tersebut, akan memunculkan ketimpangan-ketimpangan. Menurut Kuncoro (2004) tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Menurut Djoyohadikusumo (1994) Kesenjangan antar daerah menyangkut pula pola dan arah investasi serta prioritas alokasinya diantara berbagai daerah dalam wilayah Negara kesatuan, khususnya dibidang sumber daya manusia dan dalam prasarana fisik. Pola dan arah investasi bidang-bidang tersebut di berbagai daerah akhirnya berpengaruh pada tingkat kesenjangan disrtibusi pendapatan antar daerah.

Hal ini membuktikan bahwa distribusi pendapatan antar wilayah suatu masalah universal, karena pada tingkat apapun kesenjangan selalu ada, dikarenakan oleh perbedaan potensial-potensial ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah. Distribusi pendapatan bersifat “alamiah” dan universal yang tidak dapat dihindari namun kondisi itu dapat juga dirubah melalui proses pembangunan. Kuznetz membuktikan bahwa hal tersebut, dalam analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju ditemukan bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun dalam tahap berikutnya hal itu akan membaik (Kuncoro, 2004).

Wie (1981) dikutip dalam Archam (2012) menyatakan bahwa ketidak-merataan distribusi pendapatan dari sudut pandang ekonomi dibagi menjadi :

1. Ketimpangan pembagian pendapatan antara yang golongan penerima pendapatan (*size distribution income*); ketimpangan yang terjadi antar golongan ini sering kali diukur dengan menggunakan koefisien Gini. Kendati Gini bukan merupakan indikator yang ideal mengenai ketimpangan pendapatan antar berbagai golongan, namun sedikitnya angka ini dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan umum dalam pola distribusi pendapatan.

2. Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan (*urban-rural income disparities*); Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat juga ditinjau dari segi perbedaan pendapatan antara masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan (*urban-rural income disparities*). Untuk membedakan hal ini, digunakan dua indikator: 1) perbandingan antara tingkat pendapatan perkapita di daerah perkotaan dan daerah pedesaan (perbedaan pendapatan rata-rata antar kedua daerah sebagai persentase dari pendapatan nasional rata-rata).
3. Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah (*regional income disparities*); ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antar berbagai daerah di Indonesia, yang mengakibatkan pula terjadinya ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah (*regional income disparities*). Ketimpangan pendapatan seperti ini disebabkan oleh penyebaran sumberdaya alam yang tidak merata serta perbedaan dalam laju pertumbuhan antar daerah, dan belum berhasilnya usaha-usaha pembangunan yang merata antar daerah di Indonesia.

Pembuktian hipotesis yang dilakukan oleh Williamson pada tahun 1966 melalui studi mengenai ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan

membandingkan antara Negara berkembang dan Negara maju dengan menggunakan data time series dan cross section. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis neo-klasik terbukti secara empiric. Model pertumbuhan Neoklasik beranggapan bahwa pertumbuhan antar daerah akan mengarah pada pola *convergence* (mengarah pada satu titik keseimbangan) walaupun tanpa campur tangan pemerintah. Sementara Model pertumbuhan Harrod-Domar (Romer, 1996) mengisyaratkan pertumbuhan antar daerah mengarah pada pola *divergence*, oleh karenanya diperlukan campur tangan pemerintah ini karena dalam kenyataannya, modal tidak mengalir ke daerah yang maju ke daerah kurang maju seperti yang diisyaratkan dalam teori Harrod-Domar, melainkan terjadi sebaliknya.

Dengan demikian, formulasi *Williamson Index* secara statistic dapat ditampilkan sebagai berikut :

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=0}^n (Y_i - y)^2 \left(\frac{f}{n}\right)}{y}}$$

Dimana:

y_i = PDRB perkapita i

y = PDRB perkapita rata-rata seluruh daerah

f = Jumlah penduduk daerah i

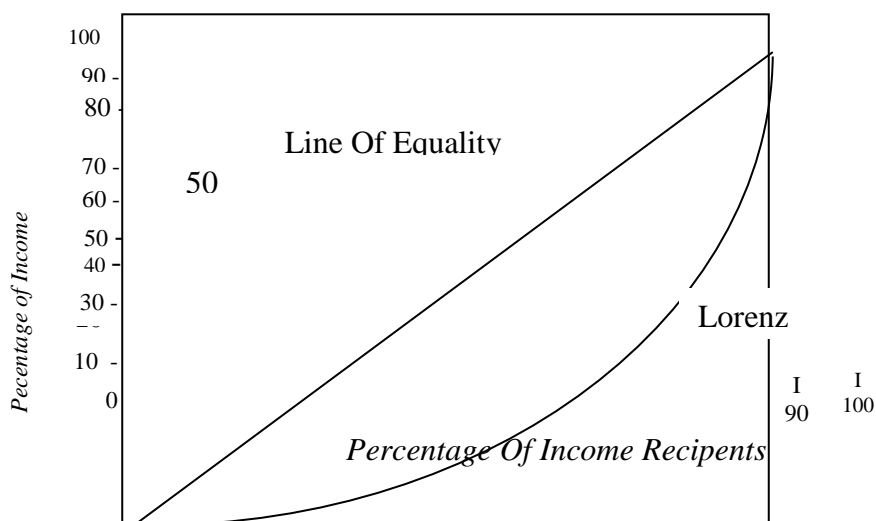
N = Jumlah penduduk seluruh daerah

Indeks ini dapat dijelaskan pengertiannya, seukuran pada dasarnya *coefficient of variation*. Bila nilai indeks dimana V_w mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila V_w mendekati nol (0) berarti merata.

Sementara itu para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan yang keduanya digunakan untuk tujuan analisis data kuantitatif: 1) distribusi pendapatan perseorangan atau distribusi ukuran pendapatan, ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah. 2) Distribusi pendapatan “fungsional” atau pangan distribusi pendapatan per faktor produksi, ukuran ini berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (Todaro 2006).

Berdasarkan teori dan beberapa pendapat para ekonom sebelumnya, distribusi pendapatan dibedakan dua ukuran pokok, yang keduanya digunakan untuk tujuan analitis dan kuantitatif. Kedua ukuran tersebut adalah distribusi ukuran pendapatan yakni besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang, dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi.

Distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) atau disebut juga distribusi pendapatan perseorangan (*personal distribution of income*) merupakan ukuran yang paling sering atau langsung digunakan. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima setiap individu atau rumah tangga. Metode lainnya yang sering digunakan untuk menganalisis statistic pendapatan perseorangan adalah kurva Lorenz (*Lorenz Curve*) seperti gambar di bawah ini :



Gambar 9.1 Kurva Lorenz (Sumber: Pattilow, 2010)

Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase jumlah penduduk penerima pendapatan tertentu dari total penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar mereka peroleh dari total pendapatan selama waktu tertentu (misal 1 tahun). Semakin jauh garis Lorenz melengkung dari garis diagonal (garis pemerataan sempurna), semakin besar tingkat ketimpangan sempurna (yakni, suatu situasi yang menunjukkan hanya satu orang yang menerima semua pendapatan nasional sedangkan penduduk lainnya tidak mendapat apapun).

Hal lainnya, ukuran kedua yang biasa digunakan para ekonom untuk mengukur distribusi pendapatan adalah distribusi pendapatan fungsional (*functional*

distribution of income) atau distribusi pangsa faktor (*faktor share distribution of income*). Beberapa literatur telah membahas tentang konsep distribusi pendapatan fungsional. Semua literatur tersebut berupaya menjelaskan pendapatan dari suatu faktor produksi berdasarkan kontribusi faktor itu dalam proses produksi. Kurva permintaan dan penawaran diasumsikan akan menentukan harga unit dari setiap faktor produksi.

Dari beberapa konsep dan teori tentang ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan antara daerah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka ketimpangan distribusi pendapatan daerah merupakan ketidakmerataan pendapatan perkapita pada setiap daerah kabupaten/kota. Ketidakmerataan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah : 1). Perbedaan potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh setiap daerah kabupaten/kota, 2). Perbedaan sumber daya manusia atau tingkat pendidikan yang dimiliki oleh daerah kabupaten/kota. Konsep tersebut mengacu kepada teori Williamson (1966) dan Harrord-Domar (1996) serta konsep ketimpangan oleh Todaro (2006), Sjafrizal (2014),

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah diukur dengan pendekatan indeks Williamson menggunakan Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan rata-rata, serta rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk pada setiap daerah. Berdasarkan indikator tersebut, selanjutnya digunakan pendekatan kurva Lorenz untuk dapat mengetahui terjadi

ketimpangan atau tidak yakni semakin jauh garis Lorenz melengkung dari garis diagonal (garis pemerataan sempurna), semakin besar tingkat ketimpangan sempurna (yakni, suatu situasi yang menunjukkan hanya satu orang yang menerima semua pendapatan nasional sedangkan penduduk lainnya tidak mendapat apapun) atau bila nilai indeks dimana V_w mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila V_w mendekati nol (0) berarti distribusi pendapatan merata.

Bagian Kesepuluh

Kinerja Pendidikan

Pembahasan tentang Teori dan konsep kinerja pendidikan mengacu kepada teori *Human Capital*. Teori *Human Capital* tersebut merupakan teori ekonomi klasik yang telah berkembang sejak sejak 1776, selanjutnya dikembangkan oleh beberapa ahli seperti Schultz (1960) dan Becker (1975) dalam Romer (1996). Kedua ahli tersebut memberikan pandangan yang berbeda tentang konsep dan formasi *Human Capital*.

Pandangan Schultz (1961) tentang *Human Capital* merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. *Human Capital* yang dimaksudkan tersebut dapat dikategorikan dalam berbagai perspektif berdasarkan bidang kajian. *Pertama*, *Human Capital* berdasarkan sudut pandang individu. memperkenalkan *Human Capital* sebagai “*something akin property*”. *Human Capital* sama halnya dengan hak milik, dimana pendidikan dan keterampilan melekat pada individu . Pandangan tersebut bertentangan dengan konsep tenaga kerja dalam perspektif klasik yang memandang *Human Capital* sebatas produktifitas kolektif tenaga kerja yang dapat menghasilkan kesejahteraan bersama.

Romer (1996) menyatakan bahwa *Human Capital* sebagai sumber fundamental produktifitas ekonomi. Hal ini berarti bahwa *Human Capital* sebagai suatu investasi yang dapat meningkatkan produktifitasnya. Bahkan Romer (1996) lebih lanjut menyatakan bahwa *Human Capital* sebagai kombinasi dari berbagai faktor yaitu pendidikan, pengalaman, pelatihan, kecerdasan, kebiasaan kerja, integritas, dan inisiatif yang dapat berdampak pada produktifitas marjinal tenaga kerja. Berdasarkan perspektif *Human Capital* yang berorientasi produksi, *Human Capital* merupakan '*Stock of Skill and Knowledge*' yang berperan dalam peningkatan produktifitas tenaga kerja untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi. Walaupun berbagai pandangan dan pengembangan konsep *Human Capital* tidak ada yang menafikan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah bagian penting dalam *Human Capital*.

Teori *Human Capital* menjadi dasar studi tenaga kerja, didasarkan pada premis bahwa produktifitas dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas tenaga kerja dimana tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, kesehatan merupakan indikator dari produktivitas. Namun pendidikan adalah unsur yang paling penting dalam *Human Capital* (Becker, 1975; Schultz, 1961).

Lebih jauh Schultz (1960) menyatakan ada tiga macam investasi dalam sumber daya manusia yaitu migrasi, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan Becker (1975), menyatakan bahwa pendidikan, pelatihan, dan

kesehatan merupakan bagian terpenting dalam investasi modal manusia.

Dalam pembangunan, *Human Capital* telah menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di beberapa Negara karena beberapa alasan, *pertama*, investasi *Human Capital* meningkatkan produktifitas tenaga kerja yang mendorong output dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, peningkatan produktifitas tenaga kerja juga meningkatkan produktifitas faktor-faktor produksi yang lain. Hal ini mengacu pada dampak internal dan eksternal *Human Capital* (Lucas, 1988).

Pendidikan jelas mempunyai pengaruh yang signifikan pada modal manusia (*Human Capital*), kualitas penyelenggaraan pendidikan akan menentukan kualitas sumberdaya manusia dan kualitas sumber daya manusia yang bagus merupakan *Human Capital* yang sangat penting dalam menunjang kehidupan ekonomi. Untuk itu guna lebih memahami hubungan antara pendidikan dan modal manusia, maka diperlukan pemahaman dua konsep tersebut, sehingga dapat tergambar jelas bagaimana kaitannya.

Bahkan Menurut Harbison & Meyers (1964) dikutip dalam Jhingan (2012:419) mengemukakan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah proses peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh rakyat suatu Negara.

Menurut undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.. Dari pengertian tersebut dapatlah dimengerti bahwa pendidikan merupakan suatu usaha atau aktivitas untuk membentuk manusia-manusia yang cerdas dalam berbagai aspeknya baik intelektual, sosial, emosional maupun spiritual, trampil serta berkepribadian dan dapat berperilaku dengan dihiasi akhlak mulia. Ini berarti bahwa dengan pendidikan diharapkan dapat terwujud suatu kualitas manusia yang baik dan mampu mengisi kehidupannya secara produktif bagi kepentingan dirinya dan masyarakat.

Pemahaman terhadap dua konsep tersebut yaitu pendidikan dan *Human Capital* dapatlah difahami bahwa kemampuan-kemampuan yang ada pada manusia (*Human Capital*) pada dasarnya adalah merupakan hasil dari suatu proses pendidikan dan pendidikan merupakan upaya untuk membentuk *Human Capital* yang berkualitas.

Perhatian para ahli ekonomi pembangunan kepada *Human Capital* yang dalam hal ini direpresentasikan dengan pendidikan, telah memunculkan model modal manusia (*Human Capital model*). Dalam model Solow (Romer 1996) yang mengasumsikan bahwa produksi bersifat *constant return to scale*. Dengan asumsi tersebut, maka output adalah given sehingga *Human Capital Model*

dengan pendekatan fungsi produksi Cobb Douglas adalah :

$$Y(t) = K(t)^\alpha H(t)^\beta [A(t)L(t)]^{1-\alpha-\beta}$$

Dimana $\alpha, \beta > 0$, dimana H= stock *Human Capital* L= Labour, sehingga pertumbuhan K dan L adalah :

$$\dot{K}(t) = S_k Y(t)$$

Dimana S_k = bagian output untuk akumulasi modal fisik dan depresiasi =0

$$\dot{L}(t) = n \cdot L(t)$$

Selanjutnya seperti dalam model Solow, kemajuan teknologi diasumsikan konstan dan eksogen, sehingga:

$$\dot{A}(t) = g \cdot A(t)$$

Akhirnya akumulasi *Human Capital* sebagai akumulasi capital secara fisik adalah

$$\dot{H}(t) = S_H \cdot Y(t)$$

Dimana S_H adalah resources yang disediakan untuk akumulasi modal manusia (*Human Capital Accumulation*).

Teori *HC* menjadi dasar studi tenaga kerja, didasarkan pada premis bahwa produktifitas dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas tenaga kerja dimana tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, kesehatan merupakan indikator dari produktivitas (Becker, 1975; Schultz, 1961). Namun pendidikan adalah unsur yang paling penting dalam *HC* (Schultz, 1961). Bahkan lebih jauh Becker (1975) yang menghubungkan tingkat pendidikan dengan produktivitas pekerja disimpulkan bahwa pekerja dengan pendidikan lebih tinggi akan lebih produktif dan menerima gaji yang lebih besar.

Rosen (1976) memperkenalkan teori tentang pendapatan yang bertumpu pada investasi *HC*. Ia menekankan bahwa pendidikan akan memperbaiki

pengetahuan individu sekaligus memperkuat kapasitas pribadi untuk belajar sambil bekerja yang akhirnya akan mempercepat pertumbuhan akumulasi HC.

Hasil penelitian Schultz 1960, Denison, 1962 yang dikutip dalam menunjukkan sekitar 20 % pertumbuhan ekonomi AS untuk beberapa dasawarsa disebabkan oleh perbaikan tingkat pendidikan dan kesehatan. Pengaruh perbaikan kesehatan meningkatkan partisipasi tenaga kerja selanjutnya memperbaiki tingkat pendidikan dan kemudian menyumbang pertumbuhan ekonomi. Tingkat kesehatan yang cukup baik akan merangsang keinginan meningkatkan produktivitas dan mengubah sikap ke arah aktivitas yang lebih bersifat kewiraswastaan atau bersikap lebih produktif.

Lebih jauh Schultz (1960) menyatakan ada tiga macam investasi dalam sumber daya manusia yaitu migrasi, pendidikan dan kesehatan. Becker (1975), menyatakan bahwa pendidikan, pelatihan, dan kesehatan merupakan bagian terpenting dalam investasi modal manusia.

Berdasarkan beberapa teori dan konsep tersebut maka capaian kinerja indikator pendidikan yang diproksi dengan Rata-Rata Lama Sekolah adalah merupakan indikator capaian pendidikan dalam jangka panjang. Konsep lainnya, capaian kinerja pendidikan merupakan dampak yang ditimbulkan aktivitas pendidikan dan seringkali dikaitkan dengan tujuan atau target yang hendak dicapai.

Bagian Kesebelas

Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan

Sejak otonomi daerah dan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka tanggungjawab pengelolaan daerah dilimpahkan kepada masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan tersebut terutama pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan diantaranya pada belanja sektor publik untuk pendidikan. Belanja sektor publik pendidikan pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan sumbernya dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana dekonsentrasi serta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebagian bersumber dari pemerintah provinsi dalam bentuk dana pendidikan gratis yang telah didistribusikan kepada masing-masing kabupaten/kota dengan alokasi 40% ditanggung oleh provinsi dan 60% ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota. Perkembangan keseluruhan belanja pemerintah sektor pendidikan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan selama 10 tahun terakhir secara keseluruhan mengalami peningkatan antara 90%-100%. Hal tersebut menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah tentang

peningkatan sektor pendidikan mendapat perhatian yang cukup serius baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Besarnya prosentase belanja sektor pendidikan tidak selalu menggembarakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Apabila kita kaji lebih lanjut, ternyata belanja pendidikan yang besar tersebut lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai. Padahal untuk meningkatkan mutu pendidikan, seharusnya proporsi antara belanja pegawai dan belanja operasional dan modal tidak terlalu timpang. Berdasarkan tabel 4.1 proporsi belanja pegawai (gaji pendidik dan tenaga kependidikan) pada 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan rata-rata mencapai 80%-85% dari total belanja. Hal tersebut menggambarkan bahwa anggaran sektor pendidikan yang dibelanjakan selama 10 tahun terakhir (2006-2015) proporsinya sebagian besar dihabiskan untuk membayar gaji pegawai (gaji pendidik dan tenaga kependidikan). Dari total belanja tersebut hanya sekitar 15%-25% pertahun yang dialokasikan untuk belanja modal dan belanja operasional. Padahal belanja yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai peserta didik adalah belanja barang, jasa dan modal karena berkaitan dengan pengembangan infrastruktur pendidikan, termasuk didalamnya pembangunan sekolah, ruang kelas baru serta fasilitas lainnya. Sementara belanja operasional diperuntukkan kepada peserta didik yang kurang mampu dari segi ekonomi dan diberikan dalam bentuk beasiswa

dan dialokasikan untuk hal-hal lainnya yang berkaitan dengan operasional di sekolah.

Untuk melihat perkembangan proporsi per bidang atau sektor yang didanai pada belaja sektor pendidikan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

A. Perkembangan Belanja Gaji

Dalam kurun waktu 2006-2015, trend peningkatan anggaran dan belanja pendidikan baik secara nasional, provinsi maupun kabupaten/kota khususnya di Sulawesi Selatan terus meningkat. Peningkatan belanja pendidikan terbesar terjadi antara tahun 2009, yaitu sebesar 17 persen. Secara riil peningkatan anggaran, yang diikuti belanja, merupakan kebijakan pemerintah pusat yang fokus untuk sektor pendidikan di daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan data penelitian distribusi anggaran berdasarkan tingkatan pendidikan dimana komposisi penggunaan anggaran pendidikan pada tahun 2008 terdiri dari 2 persen untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), 58 persen untuk pendidikan dasar, 9 persen untuk sekolah menengah, 8 persen untuk pendidikan tinggi, dan 23 persen untuk lain-lain. Tahun 2009, anggaran pendidikan untuk pendidikan dasar dikurangi dan dialokasikan ke pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, masing-masing 1 persen. Data ini juga menggambarkan lebih dari separuh tambahan dana anggaran pendidikan dibelanjakan untuk gaji guru dan sertifikasi guru. Meningkatnya belanja gaji guru disebutkan didorong oleh

meningkatnya jumlah guru serta perubahan kontrak guru menjadi pegawai negeri sipil.

1. Gaji Tenaga Pendidik (Guru)

Meningkatnya jumlah guru kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menjadi perhatian sehingga beberapa sekolah daerah kabupaten/kota jumlah gurunya didapati melebihi jumlah murid sejak tahun 2004. Peningkatan jumlah guru tidak berbanding lurus dengan hasil belajar para siswa. Setelah desentralisasi, jumlah guru harus ditingkatkan dan rasio antara guru dan siswa meningkat dengan pesat. Memiliki banyak guru sepertinya hal yang baik. Peningkatan belanja pendidikan memang meningkatkan kemajuan dalam akses dan kesetaraan pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin didapati masuk sekolah pada usia lebih dini dan bersekolah lebih lama. Namun, secara kualitas, pendidikan daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan masih jauh dari harapan.

Gaji tenaga pendidik meliputi gaji dan tunjangan serta honor untuk guru (PNS maupun non-PNS) yang bekerja di sekolah negeri serta sekolah swasta dan madrasah (jika dalam pembayaran gaji dan tunjangan serta honor dari APBD Kab/Kota bagi guru sekolah swasta/madrasah), honor tutor PAUD dan PLS (khususnya Paket A, Paket B, Paket C), kegiatan-kegiatan belanja langsung di dokumen anggaran yang

dicantumkan sebagai belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa, namun sesungguhnya merupakan unsur menambah gaji

Pada prakteknya, belanja pendidikan sebagian besar porsinya ke belanja pegawai (gaji pendidik) pada 23 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan rata-rata telah mencapai 8%-10% pertahun. Namun apabila dihitung secara total pertumbuhan belanja pegawai sejak tahun 2006-2015 telah mencapai 90%-100%. Hal tersebut disebabkan karena selain penambahan jumlah tenaga guru pada masing-masing daerah, juga karena adanya kenaikan gaji pokok bagi pegawai serta adanya penambahan tunjangan profesi dalam bentuk sertifikasi bagi guru. Dari 23 Kabupaten/Kota tersebut ada 2 (dua) kabupaten/kota yang memiliki belanja pegawai sektor pendidikan tertinggi bahkan sampai rata-rata 10% pertahun yakni: kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, sedangkan daerah yang memiliki belanja pegawai yang terendah yakni : Bulukumba, Maros, Tana Toraja dan Makassar, yang hanya mencapai rata-rata 5%-6% saja pertahunnya.

2. Gaji Tenaga Kependidikan Non-Pendidik

Tenaga kependidikan non-guru merupakan tenaga administrasi yang ditempatkan pada kantor dinas pendidikan serta pada masing-masing sekolah pada setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. gaji dan tunjangan serta honor untuk tenaga kependidikan (PNS maupun

non-PNS) yang bekerja di sekolah negeri serta sekolah swasta dan madrasah (jika ada pembayaran gaji dan tunjangan serta honor dari APBD Kab/Kota bagi tenaga kependidikan sekolah swasta/madrasah), gaji dan tunjangan serta honor untuk pegawai bukan tutor (PNS maupun non-PNS) yang bekerja di lokasi dimana kegiatan PAUD dan PLS dilaksanakan, misalnya SKB, gaji dan tunjangan serta honor untuk pegawai (PNS maupun non-PNS) yang bekerja di Kantor Dinas Pendidikan maupun KCD Pendidikan, kegiatan-kegiatan belanja langsung di dokumen anggaran yang dicantumkan sebagai belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa, namun sesungguhnya merupakan unsur menambah gaji. Penambahan jumlah pegawai/tenaga administrasi tersebut mempengaruhi jumlah belanja pegawai telah mencapai 8%-9%, sama halnya dengan belanja pegawai guru sebelumnya. Namun beberapa kabupaten/kota memiliki proporsi belanja pegawai non-guru lebih kecil hanya 5%-6% saja. Sama halnya dengan belanja pegawai tenaga pendidik, kabupaten Bulukumba dan Sinjai merupakan daerah yang memiliki proporsi belanja pegawai non guru telah mencapai 10%, serta kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, Kota Makassar dan Kabupaten Tana Toraja memiliki rata-rata pertumbuhan belanja pegawai non-guru 5% - 6% pertahun. Peningkatan jumlah belanja tersebut disebabkan karena adanya kenaikan gaji pokok pegawai serta adanya penambahan pegawai tenaga

administrasi pada masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

B. Perkembangan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal

Belanja barang dan jasa merupakan belanja sektor pendidikan yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan yang nilai manfaatnya kurang dari satu tahun dan umumnya merupakan pengeluaran habis pakai. Sementara belanja modal ditujukan untuk pembelian/pengadaan/pembangunan sektor pendidikan yang nilai manfaatnya lebih dari satu tahun. Kriteria belanja modal disamping nilai manfaat, juga ditentukan oleh nilai perolehan ,digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Besarnya belanja barang jasa serta belanja modal sektor pendidikan pada 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan selama 10 tahun terakhir (2006-2013) dapat dibagi ke dalam pos pembelanjaan yaitu:

1. Belanja Barang dan Modal Untuk Sekolah (Infrastruktur sekolah, Belanja Proses Belajar Mengajar

Belanja barang, jasa dan modal untuk sekolah dimaksudkan untuk pembelanjaan infrastruktur sekolah diantaranya pembangunan gedung sekolah baru, rehab ruang kelas dan penambahan ruang kelas dan ruang untuk perpustakaan sekolah. Selain itu pembelanjaan

barang dan jasa untuk proses belajar mengajar diperuntukkan untuk pembelian sarana dan media pembelajaran serta buku untuk siswa di sekolah. Pertumbuhan Besarnya belanja tersebut selama 10 tahun terakhir pada 23 kabupaten/kota dimana dari keseluruhan kabupaten/kota rata-rata mengalami kenaikan belanja pada sektor ini antara 4%-9% atau secara total kenaikan selama 10 tahun terakhir sebesar 40% sampai 90%. Beberapa daerah yang memperoleh belanja pendidikan selama 10 terakhir antara 8%-9% diantaranya : Kabupaten Selayar, Kabupaten maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Sidrap, Bone, Kota Makassar dan Palopo. Hal ini disebabkan oleh karena pada daerah-daerah tersebut selama 10 tahun terakhir banyak membangun infrastruktur untuk penambahan sekolah dan kelas baru untuk menampung jumlah penduduk usia sekolah SD sampai SMA yang setiap tahun mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Sementara pada daerah kabupaten/kota yang mendapat lebih sedikit belanja barang dan jasa serta modal selama 10 tahun terakhir diantaranya: Kabupaten Sinjai, Kabupaten Barru, Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara hanya memperoleh penambahan anggaran belanja antara 3%-4% pertahun.

2. Belanja Barang dan Modal Untuk Non-Sekolah

Yang diklasifikasikan sebagai belanja modal untuk non-sekolah adalah belanja modal yang manfaatnya bukan untuk sekolah, guru, atau siswa. Termasuk di

dalamnya pembangunan gedung dan ruang, pengadaan peralatan dan kendaraan bermotor, dan lain-lain untuk kantor Dinas Pendidikan, UPTK/KCD Pendidikan, SKB, dan lain-lain. Untuk melihat besarnya belanja serta rata-rata pertumbuhannya setiap tahun selama 10 tahun terakhir (2006-2013) pada 23 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan setiap tahunnya mengalami kenaikan antara 4% - 9% pertahun atau jika ditotalkan selama 10 tahun terakhir masing-masing daerah kabupaten/kota bervariasi antara 40%-90% (seperti pada tabel 4.5). Kabupaten Maros dan Kota Makassar memperoleh kenaikan belanja barang, jasa dan modal non-sekolah terbesar yakni sampai 90% selama 10 tahun terakhir atau rata-rata 9% pertahun. Sementara kabupaten Enrekang, Luwu Utara dan Luwu Timur memperoleh lebih kecil kenaikan belanja yakni hanya sekitar 40% selama 10 tahun atau rata-rata 4% pertahun. Besarnya kenaikan belanja barang, jasa dan modal non-sekolah disebabkan karena pada daerah-daerah tersebut selama 10 tahun terakhir dilakukan pembenahan infrastruktur non-sekolah diantaranya pembenahan kantor dinas pendidikan, kantor UPTD serta pembelian kendaraan dinas.

C. Perkembangan Belanja Operasional 23 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sejak tahun 2006-2015

Sejak dilaksanakannya desentralisasi pada tahun 2001, biaya operasional sekolah terutama sekolah negeri

yang semula dialokasikan melalui belanja rutin pemerintah pusat telah dialokasikan langsung ke daerah sebagai bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU). Namun demikian sampai dengan tahun ajaran 2004/2005 masih terdapat sebagian kabupaten/kota yang tidak mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional sekolah dan sebagian besar lainnya mengalokasikan dalam jumlah yang belum memadai.

1. Belanja Operasional Untuk Sekolah

Belanja operasional non-gaji untuk sekolah mencakup sekolah negeri serta sekolah swasta dan madrasah (jika ada pengeluaran APBD Kab/Kota untuk sekolah swasta/madrasah). Belanja-belanja yang diklasifikasikan sebagai belanja operasional sekolah non-gaji dapat mengacu pada Standar Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Perkembangan belanja operasional untuk sekolah non-gaji pada 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dimana Kabupaten Maros, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pangkep merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan belanja operasional sekolah yang paling tinggi setiap tahunnya. Rata-rata belanja operasional sekolah untuk ketiga daerah tersebut mencapai 10% pertahun atau akumulasi selama 10 tahun mencapai sebesar 100% pertumbuhannya dari tahun 2006 sampai tahun 2015. Besarnya pertumbuhan belanja operasional sekolah untuk ketiga kabupaten tersebut dipengaruhi oleh

meningkatnya kebutuhan sekolah serta meningkatnya jumlah siswa pada masing-masing usia sekolah mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai tipunngkat Sekolah Menengah Umum (SMU). Adapun daerah yang memiliki belanja operasional sekolah yang paling kecil terdapat pada kota pare-pare, kabupaten Enrekang dan kabupaten Bantaeng. Kota Pare-Pare hanya memiliki rata-rata 1% pertumbuhan belanja operasionalnya dan kabupaten Enrekang serta Kabupaten Bantaeng memiliki rata-rata jumlah belanja operasional sekolahnya sebesar 5%/tahun selama 10 tahun terakhir (2006-2015).

2. Belanja Operasional Non-Gaji Untuk Non-Sekolah

Belanja operasional non-gaji untuk non sekolah mencakup: belanja operasional non-gaji untuk administrasi kegiatan PAUD/PLS dan pengelolaan lokasi/ruang/gedung pelaksanaan kegiatan PAUD dan PLS (misalnya SKB), dan belanja operasional non-gaji Dinas Pendidikan serta UPTD/KCD Pendidikan mencakup: a) pemberian beasiswa kepada siswa, b) pelaksanaan lomba-lomba oleh Dinas Pendidikan untuk tingkat kabupaten/kota dan keikutsertaan lomba-lomba di tingkat provinsi dan nasional, c) pemberian beasiswa kepada guru, d) pelaksanaan akreditasi sekolah, e). pelaksanaan sertifikasi guru. Pemberian beasiswa kepada siswa untuk meringankan beban biaya personal (biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orangtua diklasifikasikan sebagai biaya operasional non-gaji non

sekolah, namun tetap merupakan biaya sektor pendidikan).

Perkembangan jumlah belanja operasional non-gaji non-sekolah selama tahun 2006-2015 pada 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Pada kurva tersebut nampak bahwa daerah memiliki rata-rata belanja operasional non-gaji non sekolah di atas 5% kecuali kota Pare-pare yang hanya memiliki rata-rata 1% saja pertahun. Kabupaten Maros, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap memiliki rata-rata belanja operasional non-gaji non-sekolah terbesar yakni mencapai 10% pertahun, atau mencapai akumulasi sebesar 100% selama 10 tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan karena pada daerah tersebut banyaknya bantuan beasiswa yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu, serta banyaknya pembiayaan terhadap kegiatan-kegiatan lomba yang diperuntukkan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Adapun daerah yang memiliki belanja operasional non-gaji non sekolah paling rendah terdapat pada kota Pare-Pare, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Bantaeng, yang masing-masing memiliki rata-rata belanja 1% dan 5% atau akumulasinya selama 10 tahun terakhir hanya 10% dan 50% saja.

Bagian Keduabelas

Ketimpangan Pendapatan

Daerah kabupaten/kota yang memiliki kondisi ekonomi yang baik tidak hanya ditandai oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat dan tinggi, tetapi juga adanya pemerataan distribusi pendapatan yang lebih baik. Distribusi pendapatan yang relatif baik ditandai oleh kondisi dimana perbedaan antara golongan masyarakat kaya dan miskin yang tidak terlalu menyolok dalam perekonomian daerah bersangkutan.

Secara empirik dan melalui perhitungan dengan menggunakan model tersebut dari 23 daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan hanya 3 daerah yakni kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pangkep yang memiliki tingkat disparitas kesenjangan antara 0.1-0.4 selama 10 tahun, artinya pada daerah tersebut tingkat kesenjangan pada distribusi pendapatan penduduknya semakin tahun semakin berkurang tingkat kesenjagannya. Akan tetapi sebagian besar daerah Kabupaten/Kota yang masih memiliki disparitas yang sangat senjang/timpang. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tingkat penyerapan tenaga kerja pada setiap

daerah kabupaten/kota mengalami peningkatan yang cukup signifikan serta pengurangan tingkat pengangguran yang cukup baik pada setiap daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun banyak menyerap tenaga kerja yang berdampak terhadap pengurangan pengangguran namun masih memiliki pendapatan yang masih relatif kecil yang dibuktikan dengan masih tinggi disparitas tingkat kesenjangan distribusi pendapatan.

Kesenjangan distribusi pendapatan antar daerah dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu kesenjangan distribusi pendapatan antar daerah secara lintas waktu (*time series*) dan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar daerah menurut lintas ruang (*cross section*)

Tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar daerah yang dihitung dengan indeks Wiilamson menghasilkan koefisien korelasi williamson yang menunjukkan posisi relatif suatu daerah terhadap daerah lainnya. Adapun indikator yang digunakan adalah PDRB perkapita konstan tahun 2010. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar daerah cukup bervariasi. Bila digunakan kriteria Oshima (1980) dan Fattah (2003), yakni : Apabila nilai Koefisien variasi $< 0,35$ termasuk kategori tingkat kesenjangan ringan, Nilai Koefisien antara $0,35-0,5$ termasuk kategori sedang dan $>0,5$ termasuk kategori kesenjangan berat. Berdasarkan hal tersebut maka tingkat kesenjangan distribusi pendapatan

antar Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12.1
Rata-Rata Nilai Koefisien Variasi Williamson Antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Periode 2006-2015

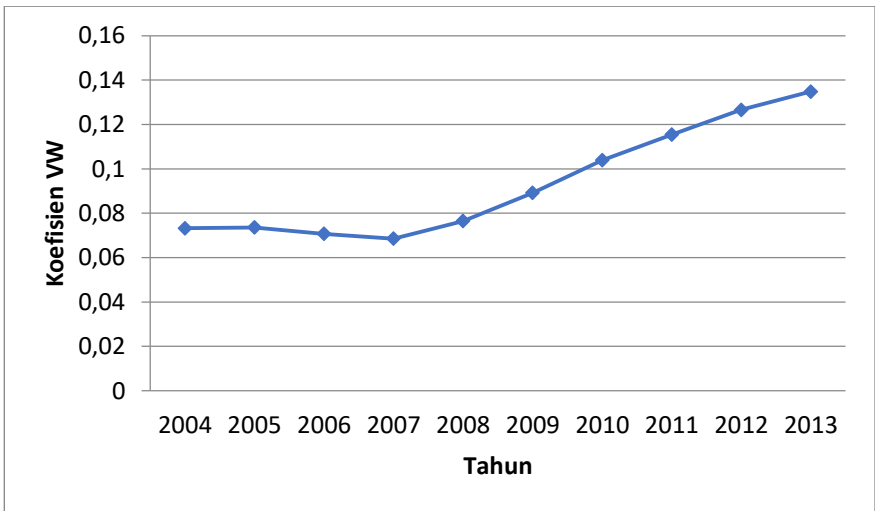
Tahun	Variasi Williamson	Kriteria Tingkat Kesenjangan
2006	0.073224	Ringan
2007	0.073573	Ringan
2008	0.070727	Ringan
2009	0.068544	Ringan
2010	0.076487	Ringan
2011	0.089161	Ringan
2012	0.103895	Ringan
2013	0.115389	Ringan
2014	0.126575	Ringan
2015	0.134834	Ringan

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar daerah di Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi turun (*convergence*) dari tahun 2006-2009 dan fluktuasi naik (*divergence*) dari tahun 2012-2015.

Meskipun tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan masih dalam kategori ringan namun berdasarkan fluktuasi pertahun dengan kecenderungan mengalami

peningkatan terutama pada 5 tahun terakhir yakni 2011-2015 cukup mengkhawatirkan.

Fluktuasi naik (divergence) dan turun (convergence) tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antara kabupaten/kota di Sulawesi Selatan secara lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 12.1 Rata-Rata Tingkat Kesenjangan Distribusi Pendapatan 23 Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan 2006-2013

Grafik di atas menggambarkan terjadinya kecenderungan kenaikan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antara daerah kabupaten/kota selama 10 tahun terakhir (2006-2013). Kecenderungan kenaikan tingkat kesenjangan tersebut secara empirik dapat disebabkan oleh karena masih tingginya jumlah pekerja

yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) kebawah dengan upah yang rendah.

Bagian ketigabelas

Tingkat Kemiskinan Antar Daerah Dan Lama Sekolah

Metodologi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin (*head count index*) yaitu penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan berdasarkan data hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Garis kemiskinan yang merupakan dasar penghitungan jumlah penduduk miskin dihitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yaitu besarnya rupiah yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan atau lebih dikenal dengan garis kemiskinan makanan dan non makanan.

Garis kemiskinan makanan yang dimaksud adalah pengeluaran konsumsi per kapita per bulan yang setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang atau jasa lainnya. Komponen garis kemiskinan makanan adalah nilai rupiah yang dikeluarkan untuk memenuhi 52 komoditi makanan terpilih hasil Susenas modul

konsumsi. Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah nilai rupiah dari 27 sub kelompok pengeluaran yang terdiri atas 51 jenis komoditi dasar non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sebagian besar atau 17 daerah di Sulawesi Selatan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan penduduknya secara persentase, namun secara kumulatif atau jumlah penduduk miskin pada setiap Kabupaten/Kota bahkan setiap tahun mengalami peningkatan jumlah penduduknya yang miskin. Rata-Rata tingkat penurunan angka kemiskinan yang dicapai oleh 17 daerah kabupaten/kota tersebut mencapai antara 1%-2% pertahun atau sekitar 10%-20% selama 10 tahun.

Kinerja pendidikan merupakan capaian kinerja hasil proses pendidikan pada sekolah formal. Capaian tersebut diperoleh melalui proses mulai dari input, proses pendidikan dan output sampai pada kinerja. Pentingnya pengelolaan layanan publik (pendidikan) yang tidak lagi berfokus pada sekedar input (terutama anggaran) ataupun output, tetapi lebih berorientasi pada hasil (kinerjas). Dengan demikian, keberhasilan pendidikan bukan lagi diukur dari berapa banyak anggaran yang telah dikucurkan (dimensi input) dan berapa banyak sekolah yang telah didirikan (dimensi output), tetapi diukur dari, misalnya, berapa banyak anak yang berada pada usia sekolah yang tetap duduk di bangku sekolah (dimensi kinerjas). Bahkan lebih baik jika dimensi dampaknya dapat tercapai terutama pada penyerapan

tenaga kerja dan peningkatan distribusi pendapatan yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita.

Pada variabel kinerja pendidikan di proksi dengan menggunakan dimensi rata-rata lama sekolah yang dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas, serta capaian tingkat pendidikan pekerja pada usia 15 tahun keatas.

Pada dimensi rata-rata lama sekolah yang telah dicapai pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten/kota Sulawesi Selatan selama 10 tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan atau hanya mengalami peningkatan rata-rata 1%-2% saja selama 10 tahun. Daerah yang penduduknya mencapai rata-rata lama sekolah paling tinggi di Sulawesi Selatan yakni kota Makassar yang telah mencapai rata-rata 10 tahun atau tingkat pendidikan penduduknya sampai pada sekolah SMA kelas 1 atau telah mencapai program pendidikan dasar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat berdasarkan renstra pendidikan sampai tahun 2014. Demikian juga pada daerah kota Pare-Pare dan kota Palopo rata-rata lama sekolah yang telah mencapai 9.9 tahun atau sekolah sampai setingkat SMA kelas 1. Namun daerah Kabupaten lainnya sebagian besar masih di bawah 9 tahun atau rata-rata masih 5-7 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa selama 10 tahun terakhir perubahan tingkat pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah pada 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan belum mencapai target nasional yaitu pendidikan dasar

tuntas 9 tahun yang dilanjutkan pada pendidikan dasar tuntas 12 tahun atau setingkat sekolah lanjutan (SMA).

Bagian Keempatbelas

Kasus Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian adalah model persamaan simultan yang terdiri dari model kinerja pendidikan, model penyerapan tenaga kerja dan model indikator sosial ekonomi. Kriteria yang digunakan adalah *Two Stage Least Square* (TSLS) dan persamaan bersifat **BLUE** (Best, Linear, Unbias, dan Estimator), maka dilakukan pengujian sebagai berikut:

A. Uji Identifikasi

Uji identifikasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah persamaan struktural yang dibangun merupakan persamaan simultan atau tidak. Uji identifikasi terhadap persamaan simultan struktural dilakukan dengan kondisi *order* atau *rank*. Hasil uji identifikasi dengan *order condition* menunjukkan bahwa semua persamaan simultan teridentifikasi "over identified" dan pengujian "rank condition" tidak menemukan determinan sama dengan nol ($M \neq 0$) dari matrik koefisien-koefisien persamaan sama artinya bahwa semua persamaan struktural tersebut merupakan persamaan simultan.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan suatu pengujian untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara variabel independen pada model regresi. Jika terjadi korelasi maka model tersebut terjadi multi dimana model yang baik adalah model yang tidak terjadi multikolinearitas karena dapat berefek pada nilai standar error yang sangat tinggi.

Untuk mendekteksi adanya multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai VIF, Semakin besar nilai VIF maka semakin mendekati terjadi multikolinearitas. Standar VIF yang ideal adalah < 10 . Berdasarkan hasil pengujian sesuai pada tabel 4.5 dan 4.6, maka model persamaan pertama dan model persamaan kedua nilai VIF antara 1-2 artinya tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF hasil pengujian pada 2 model tersebut tidak > 10 .

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya serial korelasi dari error term yang terdapat dalam suatu persamaan regresi. Gejala serial korelasi dalam konteks time series terjadi bila error term pada suatu periode tertentu berpenaruh kepada periode waktu berikutnya, atau dengan kata lain jika error term dari periode waktu berlainan saling berkorelasi. Metode yang digunakan untuk menguji serial korelasi ini yaitu dengan menggunakan uji Durbin Watson dan Uji Run. Uji Run biasanya dilakukan apabila pada suatu pengujian Durbin-Watson didapat hasil "tidak ada

kesimpulan atau berada pada daerah tak tentu: (No decision).

Pengujian ada tidaknya masalah autokorelasi pada nilai residual (error term) dalam persamaan regresi yang diteliti dilihat melalui statistik Durbin Watson (D-W).

Dengan menetapkan H_0 adalah dua ujung, yaitu bahwa tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif, maka jika,

$0 < d < d_L$: H_0 ditolak, ada korelasi positif

$d_L < d < d_U$: Tidak ada keputusan

$4 - d_L < d < 4$: H_0 ditolak, ada korelasi negatif

$4 - d_U < d < 4 - d_L$: Tidak ada keputusan

$d_U < d < 4 - d_U$: H_0 tidak ditolak, tidak ada korelasi positif/negatif.

Nilai D-W yang diperoleh dari model selanjutnya dibandingkan dengan tabel D-W. hasil pengujian D-W adalah sebagai berikut:

Tabel 14.3
 Hasil Pengujian Autokorelasi Menggunakan Durbin-
 Watson

Keterangan	Variabel Dependent dalam Model Regresi			
	RLS	BP	Poverty	VW
K	4	4	4	4
N	230	230	230	230
DW Statistik	2.424	2.582	2.405	2.470
DW Tabel pada $\alpha = 0.05$				
dL	1.534	1.534	1.534	1.534
dU	1.743	1.743	1.743	1.743
Hasil	TAA	TAA	TAA	TAA

Keterangan:

K = Jumlah Variabel dalam Persamaan tanpa Konstanta

N = Jumlah Observasi

RLS = Rata-Rata Lama Sekolah

Poverty = Tgkt Kemiskinan

VW = Ketimpangan

Berdasarkan tabel 14.3, selanjutnya digambarkan melalui pengujian H_0 yakni Hasil perhitungan statistik Durbin-Watson (D-W) untuk model regresi pada 2 model persamaan masing-masing RLS=2.424, BP=2.582 Pov=2.405 Vw= 2.470 semuanya berada dalam rentang $d_u < d < 4-d_u$ yaitu antara 1.743 dan 2.667. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada model persamaan I dan II tersebut tidak terdapat keberadaan masalah autokorelasi dengan tingkat kepercayaan 95%.

B. Estimasi Model Penelitian

Model pertama dan kedua yang dibahas dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis belanja pemerintah sektor pendidikan, dimana belanja sektor pendidikan diproksi dengan : BP, Kemiskinan dan Ketimpangan Dalam Model Tersebut variabel Endogeunus adalah Kinerja Pendidikan yang terdiri dari :Rata-rata lama sekolah (RLS). Untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan terhadap kinerja pendidikan antar daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dimana kinerja pendidikan di proksi dengan menggunakan rata-rata lama sekolah:

$$RLS_{it} = \beta_0 + \beta_1 BP_{it} + \beta_2 POV_{it} + \beta_3 VW_{it} + e1_{it} \dots \dots \dots 1$$

$$POV_{it} = \beta_4 + \beta_5 RLS_{it} + \beta_6 BP_{it} + \beta_7 VW_{it} + e2_{it} \dots \dots \dots 2$$

$$VW_{it} = \beta_8 + \beta_9 RLS_{it} + \beta_{10} BP_{it} + \beta_{11} POV_{it} + e3_{it} \dots \dots \dots 3$$

Berdasarkan hasil estimasi model tersebut di atas yang menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* dengan metode SUR, nampak bahwa belanja pemerintah sektor pendidikan, tingkat kemiskinan, Ketimpangan berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap kinerja pendidikan yang diproksi dengan variabel Rata-Rata Lama sekolah (RLS). Perbandingan Nilai koefisien estimasi model belanja pemerintah sektor pendidikan pada 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14.1
 Hasil Estimasi Model Kinerja Pendidikan Persamaan I

Variabel Independen	TH	Koefisien (e)	t- hitung	Sig.	VIP
BP	+	0,532*	3.658	0.00 0	1.73 4
Poverty	+	-0,350**	-2.47	0.01 4	1.35 0
Vw	+	0,344**	2.576	0.01 1	1.90 9
Constant		-5.927	-1.744		
R ²	0.406				
Adjusted R ²	0.157				
F Hitung	14.879				
DW	2,242				
N	230				

Sumber : Analisis data Sekunder setelah diolah, 2016

Keterangan:

- *) Signifikan pada taraf signifikansi 0.01 atau 99%
- ***) Signifikan pada taraf signifikansi 0.05 atau 95%
- ***) Signifikan pada taraf signifikansi 0.10 atau 90%

Dari nilai hasil pengolahan data berdasarkan tabel 4.11 selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam persamaan Model Persamaan I sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 RLS &= 5.927 + 0.532 BP - 0.350 Pov + 0.344Vw \\
 T_{stat} &= (3.6558) \quad (-2,470) \quad (2.576) \\
 R^2 &= 0.406 \quad Adj R^2 = 0.154 \quad SE = 3.398 \quad DW-Stat = 2.242
 \end{aligned}$$

Untuk model persamaan 2 dan 3 dengan model regresi dapat dilihat sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pov} &= 7.878 + 0.3780 \text{BP} - 0.111 \text{RLS} + 0.122 \text{Vw} \\
 \text{T}_{\text{stat}} &= (4.545) \quad (1,367) \quad (-1.600) \\
 \text{R}^2 &= 0.734 \quad \text{Adj R}^2 = 0.530 \quad \text{SE} = 1.992 \quad \text{DW-Stat} = 2.582
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Vw} &= 7.895 + 0.291 \text{BP} + 0.008 \text{RLS} + 0.000 \text{BPov} \\
 \text{T}_{\text{stat}} &= (4.130) \quad (0,117) \quad (-0.000) \\
 \text{R}^2 &= 0.594 \quad \text{Adj R}^2 = 0.342 \quad \text{SE} = 1.687 \quad \text{DW-Stat} = 2.406
 \end{aligned}$$

Koefisien regresi hasil estimasi menunjukkan perubahan nilai kinerja pendidikan bahwa jika terdapat kenaikan perubahan nilai (+/-) dari variabel bebas, dengan asumsi ceteris paribus maka pengaruhnya terhadap variabel terikat (RLS) Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 0.157 atau sebesar 1.57% , Belanja Pendidikan (BP) sebesar 0.342 atau sebesar 3,4%, Kemiskinan (Poverty) sebesar 0.179 atau sebesar 1.79%, dan Ketimpangan (Ww) sebesar 0,157 atau 1.57%.

Probability atau tingkat signifikansi dari masing-masing variabel bebas, baik secara parsial maupun secara serempak menunjukkan nilai 0,000 atau yang rendah kecuali Belanja Gaji Pegawai, hal ini berarti jika dilakukan pengujian, maka variabel-variabel bebas sebagian besar berpengaruh negatif terhadap kinerja pendidikan yang diproksi dengan capaian rata-rata lama sekolah secara statistik pada tingkat kepercayaan 1-10%. Sedangkan secara bersama-sama (serempak) variabel bebas berpengaruh secara statistik pada tingkat kepercayaan 1%.

Daftar Pustaka

- Amir Archam, 2013 *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pergeseran Sectoral, dan Pola Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Sulawesi dan Jawa (2011)*). Disertasi Bandung pascasarjana Unpad.
- Anwar Sanusi, 1998. *Pengaruh Alokasi Sumber Dana terhadap Perubahan Struktur Produksi dan Distribusi Pendapatan Antar daerah di Indonesia*. Disertasi. Bandung Pascasarjana Unpad.
- Bajo-Rubio, Oscar. 2000. "A Further Generalization of The Solow Growth Model: The Role of The Public Sektor", *Economic Letter* . Elsevier
- Baltagi. Badi H. 2001. *Econometric Analysis of Panel Data*, England: John Wiley & Sons.
- Barr. Nicholas. 2002. *"The Benefit of Education What We Know and What We Don't*, London School of Economics.
- Barro. Robert J. and Jong Wha Le. 2001. *"International Data on Educational Attainment: Updates and Implications"*, Oxford Economics papers 3 ; Oxford University Press

- Barro, Robert J And Sala-i-Martin 1995. *Economic Growth*.
New York: McGraw-Hill
- Barro. Robert J, 2003. " *Education as Determinant of
Economic Growth*",
www.oecd.org/dataoecd/5/491825455.pdf
- Bassanini, Andrea and Stefano Scarpetta, 2002. " *Does
Human Capital Matter for Growth in OECD countries?:
A pooled Mean-Group Approach*" *Economic Letter* 74
- Back. Nathaniel and Jonathan N Katz. 1995. " *Nuisance vs
Substance; Specifying and Estimating Time-series-Cross-
section Models*:. *Political Analysis* Volume 6.
- Bellante Don and Mark Jackson. 1990. *Ekonomi
Ketenagakerjaan*. Jakarta LP-FEUI
- Benadvid-Val. Avrom. 1991. *Regional and Local economic
Analysis for Practitioner (4th edition)* New York:
Prager
- Blakely. Edward J. 1989. *Planning Local Economics
Development Theory and Practice*. New York: Sage
Publication. Inc
- Budiono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta.
BPFE

- Branson. William H. 1987. *Macroeconomic Theory and Policy* (9^{Second Edition}) Singapore: Harper International Edition.
- Breton, Theodore R. 2003. "Education: How its Distribution Affects A Nation's Income", *Journal of Economic Literature*.
- Chen. Xiujian, Shu Lin and Robert W Reed. 2003" *Another Look at What To Do With Time-Series Cross-Section Data: With Application to Estimating the Effect of Taxes on State Incomes*:. *Jounal of Economic Literature*.
- Chang.Wen-ya. 1999. *Government Spending, Edegounous Labor, and Capital Accumulation*. *Journal of Economics Dyanamics & Control*. Elsevier.
- De Gregoria. Jose and Jong Wha Lee, 1999. "Education and Income Distribution: New Evidence from Cross-Country Data". *Series Economia* No. 55
- De la Fuente, Angel 2003. "Human Capital and National Competitiveness: The State of The Evidence". *Institute de Analisis Economisco*. CSIC.

- Dowrick, Steve. 2002. *“Investing in The Knowledge Economy: Implications for Australian Economic Growth”*, Economic and Social Outlook Conference.
- Dowrick, Steve. 2002. *“The Contribution of Innovation and Education too Economic Growth”*. Melbourne Institute Economic and Social Outlook Conference.
- Dufour, Jean-Marie and Lynda Khalaf. 2000. *‘Exact test for Contemporaneous Correlation of Distrubance in Seemingly Unrelated Reggressions’*. Scientific Series CIRANO.
- Dur, Robert A.J. and Coen N, Teulings 2002. *“Education, Income Distirbution and Public Policy”*. Tinbergen Institue, Erasmus University.
- Fadiya, B, B. Volume 15 No. 4 2010. *Determinants Of Educational Kinerja in Nigeria (1975-2008)*. European Journal of Social Science.
- Fattah, Sanusi, 2005. *Pengaruh Pertumbuhan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan antara Daerah di Indonesia Periode 1987-2003*. Disertas Unpad Bandung

- Faith E. Crampton. Vol 47. No. 3 pp. 305-332, 2009. *Spending on School Infrastructure: does money matter?* Journal of Administration.
- Ferreira. Fransisco H.G. and Ricardos Paez d Barros 2000. *"Education and Income Distribution in Urba Brazil 1976-1996."* CEPAL, Review.
- Frantzen Dirk 2000. *"R & D, Human Capital and Technology Spillovers: A Cross Country Analysis"*. Scandinavian Journal of Economics 102 (1).
- Glasson, John. 1978. *An Intoduction to Regional Planning: Concepts, Theory and practice*. London: Hutchinson & Co. Ltd.
- Goncalves, Flavio de Oliveira. 1998. *"Personal Income Distribution, Human Capital and Economic Growth: Evidences of Confergence Club of Brazillian States"*. Journal of Economic Literature.
- Green. William H. 2000. *Econometric Analysis (4th edition)*. New Yorkz: McGraw-Hill Higher Education.
- Gunawan Sumohadiningrat. 1999. *Ekonometrika Pengantar*. Yogyakarta: BPFE
- Gylfason, Thorvaldur and Gyfi Zoega, 2001.

“Education, Social Equality and Economic Growth: A View of The Landscape”. CEPR

Gupta Sanjeev, Verhoeven Marijn. 2001. *The Efficiency of Government Expenditure Experiences From Afrika*. Journal of Policy Modelling. North.Holland.

Hanushek, Eric A And Dennis D Kimko (2000), “*Schooling, labor-Force Quality and The Growth of Nation*”. The American Economic Review, Vol. 90, No.5

Hendra Esmara, 1975 “*Regional Income Disparities*”. Bulletin of Indonesian Economic Studies, No. 11

Hera Susanti, M. Iksan, dan Widyanti, 2000. *Indikator-Indikator Makroekonomi (edisi kedua)*, Jakarta : LP-FEUI

Hsiao Ceng. 1999. *Analysis of Panel Data*, New York: Econometrical Society Monographs

Intrilligator, Michael 1994. *Econometric Models, Techniques, and Application” (2nd Edition)*, New York: Prentice-Hall

Chomsisengphet, S. L. and D. K. McGee (2007). "Poverty Rates and Spending on Public Education at the K-12

Level: Is There a Correlation?" Oshkosh Scholar II: 13-18.

Fadiya, B., B (2010). "Determinants Of Educational Kinerjas in Nigeria (1975-2008)." European Journal of Social Science 15.

Masood S.A, I. Nasir, et al. (2011). "The Impact of Human Capital On Urban Overty: The Case of Sargodha City." Journal of Sustainable Development IV.

Oztur, I. (2001). "The role of education in economic development: a theoretical perspective." Journal of Rural Development and Administration XXXIII(1): 39-47.

Romer, D. (1996). "Advanced Macroeconomics (1st edition) ,Singapore: McGraw-Hill Higher Education."

Romer, D. (2001). "Advanced Macroeconomics (1st edition), Singapore: McGraw-Hill Higher Education."

Todaro, M. P. (2000). "Economic Development (7th edition). New York: Addison-Wasley Logman, Inc."

Islam, Nasrul, 1995. " *Growth Empirics*" The Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No.4

Iwan Jaya Azis, 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: LP-FEUI

Jhingan, M.L. 1994. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Terjemahan D Guritno. Jakarta: Rajawali Pers.

Johnston. J. 1984. *Econometrics Methods (3rd edition)*, Philipine: McGraw-Hill

Jong-Wha Lee, 2000. " *Education*". Backround Paper Examining The State of Andean Region for The Andean Competetiveness Project.

Kuncoro, Mudrajad, 2004. " *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan Strategi dan Peluang*" . Jakarta, Penerbit Airlangga

.....,2006, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan* (edisi keempat), Yogyakarta, AMP YKPN

....., 2010, *Masalah, Kebijakan dan Politik ekonomika Pembangunan*, Jakarta, Penerbit Airlangga

- Ludger, Linnemann. 2009, *Macroeconomic effects of Shocks to Public Employment*. Journal Macroeconomic. Elsevier.
- Mankiew, N Gregory, 2000. *Macroeconomics (4th edition)*. New York: Worth Publisher. Inc
- Mankiew N. G, and D Romer, D.N. Weil, 1992, "A Contributuon to the Empirics of Economic Growth". Quarterly Journal of Economics.
- Mankiew N. G, 2003, *Pengantar Ekonomi*, PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta
- Mangkusubroto, Guritno. 2000. *Ekonomi Publik*, Yogyakarta, BPFE
- Masood S.A, Iqbal Nasir & Muh Waqas. Vo. 4. No. 1 Feb 2011. *The Impact of Human Capital On Urban Overty: The Case of Sargodha City*. Journal of Sustainable Development.
- Mingwei Yuan, & Wenli Li, 2000: *Dynamic Employment and Hours Effect Of Government Spending Shocks*. Journal of Economic Dynamics and Control. Elsevier.
- McDonald, Scott and Jennifer Roberts, 2002. "Growth and Multiple Form of Human Capital in An Augmented

Solow Model: A Panel Data Investigation", Economics Letter 74, Elsevier.

Nafsiger, E Wayne, 1997. *The Economics of Developing Countries*, New Jersey: Prentice Hall, upper Saddle River.

17

Osman Rani Hassan & Raja Rasiah. Vol.3, No. 1 April 2011 pp. 61-76. *Poverty and Student Performance in Malaysia*. International Journal of Institutions and Economics.

Nicholls, Shelton 2002, "*Panel Data Modelling of Long-Run Per capita Growth Rates in The Caribbean: An Empirical Note*.". Integration & Trade.

Sadono Sukirno, 2000. *Makroekonomi Modern Perkembangan dari Klasik hingga Keynes baru*. Jakarta: Rahawali Pers.

Schiff. Aaron. 1999. "*The Connection Between Education and Growth: A Summary of Recent Cross-Country Empirical Evidence*", Economics of Development.

Todaro, Michael P. 2000. *Economic Development (7th edition)*. New York: Addison-Wasley Logman, Inc

Tulus T.H. Tambunan. 1996. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Umar Juoro, 2003, "*Sumber Pertumbuhan Ekonomi*", Cides Online-Ekonomi. Htm

Uzuchukow Amakom, Vol. 5 No. 12 Desember 2010, *Distributional Impact of Public Expenditure on Education and Healthcare in Nigeria: A Gender Based Welfare Dominance Analysis*. International Journal of Business and Management.

Van Marrewijk, Charles. 1999. "*Capital Accumulation, learning, and Endogenous Growth*". Oxford Economic paper 51.

Creswell, John W. 2008. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. New Jersey: Prentice Hall.

Gujarati, D. N. dan Porter, D. C., (2012), *Dasar-dasar Ekonometrika: buku 2*, Salemba Empat, Jakarta, alih bahasa: Raden Carlos Mangunsong, hal. 423-503

Biodata Penulis



Dr. Basri Bado, S.Pd.,M.Si.,
Lahir di Kabupaten Jeneponto,
Propinsi Sulawesi Selatan, 9
Januari 1974. Merupakan
Doktor dalam Bidang
Pendidikan Ekonomi. Saat ini
merupakan Dosen Tetap Pada
Program Studi Ekonomi

Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Selain itu juga mengajar pada Program Pascasarjana UNM dan beberapa perguruan tinggi lainnya di Makassar. Selain mengajar juga aktif dalam melakukan berbagai kegiatan ilmiah seperti penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu sosial dan ilmu ekonomi, juga penulis dan pemakalah pada jurnal-jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional.



Dr. Hj. Sitti Hasbiah, M.Si.,

Lahir di Bantaeng, 15 Desember 1967. Pendidikan Sarjana S1 (1990) pada Program Studi Pendidikan Ekonomi/Pendidikan Koperasi IKIP Ujung Pandang. Program Magister (1999) pada Program Studi Manajemen Agribisnis Unhas Makassar. Tahun 2005 menyelesaikan

Program Doktor dalam Bidang Ekonomi Manajemen di Universitas Padjajaran Bandung. Pekerjaan staf pengajar pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UNM. Selain itu juga mengajar pada Program Pascasarjana UNM dan beberapa perguruan tinggi lainnya di Makassar. Selain mengajar juga aktif dalam melakukan berbagai kegiatan ilmiah seperti penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu sosial dan ilmu ekonomi, juga penulis dan pemakalah pada jurnal-jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Buku yang merupakan hasil penelitian yang telah dipublikasikan antara lain berjudul *Revitalisasi Pasar Tradisional: Meningkatkan Daya Saing Pasar Tradisional dalam Perspektif Manajemen dan Ekonomi Kelembagaan*.



Muhammad Hasan, S.Pd.,M.Pd. adalah Magister dalam bidang Pendidikan Ekonomi pada Universitas Negeri Makassar. Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 06 September 1985. Menyelesaikan program pendidikan S1 pada

Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi Universitas Negeri Makassar pada tahun 2007 dan Program S2 pada Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar pada tahun 2009. Terhitung sejak tanggal 01 Desember 2010, terangkat sebagai dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Telah menghasilkan enam karya buku yang telah diterbitkan, yaitu Metode Penelitian, Manajemen Sumberdaya Manusia, Penelitian Tindakan Kelas, Koperasi (Jilid 1 dan Jilid 2), Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Model dan Strategi Penguatan Ekonomi Rakyat dalam Perspektif Ekonomi Lokal, serta Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan.



Syamsu Alam, S.Si., M.Si. Akrab dipanggil Alam, Lahir 25 Oktober 1980 di Bontonompo Gowa. Sekolah Dasar sampai SMA di selesaikan di daerah yang sama. Tahun 1999 kuliah di Jurusan Matematika FMIPA UNM. Tahun 2011 melanjutkan studi S2 di Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Unhas. Selama menjadi mahasiswa di Unhas pernah terlibat dalam beberapa kegiatan BAPPENAS, Riset Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen (P3KM) Unhas diantaranya *Sulawesi Diagnostic Development* (P3KM-WB). Menjadi contributor buku P3KM-BAPPENAS yang berjudul, *meneropong Kawasan Timur Indonesia* (2014). Sejak 2014 menjadi Dosen di Fakultas Ekonomi UNM. Menulis beberapa Artikel di Jurnal dan media massa. Diantaranya, *Underground Economy dan distorsi Demokrasi* (Jurnal Peradaban PB-HMI, 2012), *Ekonomi Kerakyatan dan Industri Lorong* (Fajar, November 2016), *Modal Sosial dan Politik Kemiskinan* (Fajar, Februari 2017), *Pasar Hoax dan 'Sakau; Kekuasaan* (Tribun Timur, September 2017). Turut menjadi Tenaga ahli Kab. Toraja Utara dan Luwu dalam Dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah. Penyusunan Tabel Input-Output Kota Makassar. Selain mengajar, aktif mengelola weblog www.alam-yin.com, dan penulis lepas ekonomi politik di Kalaliterasi.com.

Selain itu membina komunitas belajar *Public Speaking* dan literasi di Proxis.com.

